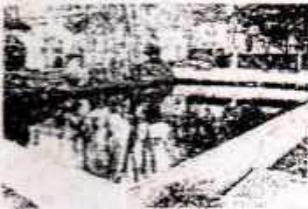
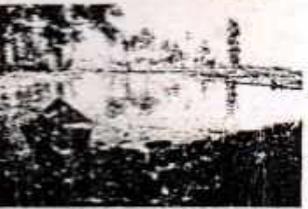


Laporan Penelitian



**PENELUSURAN KEMBALI HARJADI
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Pustaka dan Dokumentasi
Kabupaten Temanggung

5.598 2T

n



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Bekerjasama Dengan



PUSAT STUDI PANCASILA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2003

PRAKATA

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian tentang Penelusuran Kembali Harijadi dan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Temanggung ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada dalam tahun 2002/2003.

Selain itu penelitian ini diharapkan merupakan rintisan dari sebuah kajian yang lebih menyeluruh dan terpadu tentang potensi sumber daya di Kabupaten Temanggung, baik yang terkait dengan alam maupun lingkungan budayanya. Oleh karena itu penelitian ini yang selain menghasilkan sebuah laporan, juga merupakan sumber inspirasi untuk rencana pengembangan kebudayaan daerah dan penetapan/revisi penetapan harijadi Kabupaten Temanggung. Dengan demikian hasil kajian ini tinggal ditindak lanjuti dengan langkah berikut, selain untuk memperkuat jatidiri Temanggung juga untuk memberi motivasi masyarakat untuk ikut membangun daerahnya. Secara formal perlu mendapat justifikasi dan legalisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama dalam hal penetapan harijadi Kabupaten Temanggung.

Penelitian dan penyusunan laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan kerja sama yang baik antarberbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya atas nama Tim Peneliti kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah memberi kesempatan kepada Tim Peneliti untuk mengerjakan penelitian ini dalam bentuk kerja sama yang baik.

2. Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung beserta segenap staf yang telah memberikan dukungan dan bantuan sejak dari awal hingga penyediaan bahan-bahan penelitian serta kemudahan lainnya.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang secara khusus juga memberikan dukungan moral, sehingga kerja sama ini dapat diwujudkan.
4. Kepala Pusat dan segenap staf peneliti pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim untuk menyelesaikan tugas ini.
5. Segenap anggota Tim Peneliti dan asisten peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini.
6. Berbagai pihak baik perorangan maupun instansional yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan kontribusi nyata dalam penelitian ini, juga disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kemudian kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak terhadap laporan ini sebagai masukan dalam perbaikan di kemudian hari.

Ketua Tim Peneliti

Djoko Dwiyanto

PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	
No. INV	25874 / B
TANGGAL	0 SEP 2014



KATA PENGANTAR

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KETIKA IBUKOTA MATARAM BERADA DI DEKAT MATA AIR YANG BERSIH-JERNIH

Buku yang berada di hadapan sidang pembaca ini adalah laporan Penelitian tentang Penelusuran Kembali Harijadi dan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Temanggung sebagai suatu hasil kerjasama antara Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Sudah menjadi tekad pengurus PSP UGM periode 2003 dan seterusnya untuk tidak lagi "berbicara" tentang Pancasila, melainkan mencari semacam model untuk diteliti, dibina dan selanjutnya diproyeksikan selanjut-lanjutnya menjadi "Negara Pancasila". Kesadaran demikian itu paralel dengan kesadaran bahwa alam semesta inipun adalah suatu "model saja", yang diisi Tuhan Seru Sekalian Alam tersedia "model" yang lebih baik, yang apabila manusia telah lulus dengan alam ini, kepadanya tersedia kesempatan sebagai partisipan Tuhan untuk menyiapkan "model" yang lebih baik, apakah itu disebut dengan istilah "surga" atau yang lainnya.

Mengapa PSP mulai kerjasama dengan Pemerintah Daerah mengenai suatu komunitas di desa ? Dan mengapa desa itu justru di wilayah Kedu ? Pada Era "gara-gara" sekarang ini, kita ingat, "Jantaran" ki dhalang:

"Kali Ilang Kedhunge"

"Pasar Ilang Kumandhange"

"wong Wadon Ilang Wirange"

(Hidup diwarnai dangkal, Pasar tanpa gema, Perempuan lupa ke-empu-annya).

Maka agar kedalaman makna kehidupan itu kita sama-sama hayati kembali, kita pindah waca ke-ibu-kotaan di muara hilir, kembali ke hulu atau udhik, ke Kedu sebagai Ibu-Kota Mataram Kuno, terutama ketika Penguasa

Dinasti pada waktu itu memilih Sumber Air Jernih di Desa Pikatan sebagai pusat kebijakan sejati tanpa residu kelahiran :

"Di dalam pemerintahan Rakai Pikatan Dinasti Sanjaya mengalami kejayaannya" (Djoko Dwiyanto, halaman 16).

Beberapa tahun yang lalu yakni ketika Lembaga Javanologi, Yayasan Panunggalan yang bergerak dalam bidang Ilmu dan Kebudayaan memilih Rakai Panunggalan sebagai sosok teladan, maka yang demikian itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret berupa kerjasama beberapa pihak, yang dalam hal ini antara PSP dengan Pemda Kabupaten Temanggung.

Dari hasil penelitian penulis ternyata bahwa Dinasti Sanjaya itu berturut-turut adalah :

Sang Ratu Sanjaya	732 – 760
Rakai Panangkaran	760 – 780
Rakai Panunggalan	780 – 800
Rakai Warak	800 – 820
Rakai Garung	820 – 840
Rakai Pikatan	840 – 856

Demikianlah sedikit gambaran tentang adanya instabilitas pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno pada periode Jawa Tengah akhir, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Walaupun demikian, suatu hal yang dapat dipetik hikmahnya, yakni para Penguasa waktu itu memilih ibukotanya berada di dekat mata air yang bersih-jernih, yang kini dikenal sebagai desa Pikatan. Yang demikian itu sangat kontras dengan gaya kehidupan kini, ketika ibu kota justru berada di hilir (muara).

Semoga dengan terbitnya buku ini khalayak ramai makin sadar bahwa kitalah satu-satunya bangsa yang tertumpu atas dua pijakan, tanah, air, tanah-air Indonesia.

Tanggal : 15 Desember 2003

DR. DAMARDJATI SUPADJAR
Kepala Pusat Studi Pancasila
UGM, Yogyakarta.
Telp.: (0274) – 553149

DAFTAR ISI

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Prakata	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I - 1
B. Tujuan dan Sasaran	I - 6
C. Lingkup Pekerjaan	I - 7
D. Metode Penelitian	I - 8

Bab II : REKONSTRUKSI SEJARAH TEMANGGUNG

A. Sumber-Sumber Sejarah Temanggung	II - 1
1. Sumber-Sumber Artefaktual	II - 2
2. Sumber-Sumber Tekstual	II - 6
B. Masa Kerajaan Mataram Kuno	II - 10
C. Masa Kerajaan Islam dan Kolonial Belanda	II - 20
D. Perkembangan Temanggung Sekitar Abad 19 M	II - 27
E. Masa Pergerakan Nasional	II - 31
1. Masa Kebangkitan Nasional	II - 31
2. Masa Radikal	II - 35
3. Masa Moderat	II - 37
4. Masa Pendudukan Jepang	II - 38
5. Masa Tahun 1948-1949	II - 39
F. Masa Pembangunan Temanggung	II - 39

Bab III : BEBERAPA ALTERNATIF PENENTUAN HARIJADI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Kriteria Harijadi	III - 1
B. Beberapa Pertimbangan Penentuan Harijadi Temanggung	III - 8

**Bab IV : KONSEP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- | | | |
|----|--|---------|
| A. | Pendekatan Studi Pengembangan Kebudayaan | IV - 1 |
| B. | Profil Potensi Budaya Kabupaten Temanggung | IV - 10 |

Bab V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- | | | |
|----|------------|-------|
| A. | Kesimpulan | V - 1 |
| B. | Saran | V - 2 |

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR TABEL

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Tabel 2.1.	Prasasti Yang Ditemukan di Kabupaten Temanggung	II – 6
Tabel 2.2.	Daftar Raja dan Penguasa yang Tercantum dalam Prasasti Mantyasih	III – 14

DAFTAR GAMBAR

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Gambar 1.1.	Tata Alir Metode Penelitian Sejarah	I – 9
Gambar 1.2.	Tahapan Penelitian Sejarah Kabupaten Temanggung	I – 10
Gambar 4.1.	Diagram Pembangunan Seni dan Budaya Berkelanjutan	IV – 3
Gambar 4.2.	Pendekatan Industri Budaya	IV – 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya Undang-Undang nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesiapan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pemerintahan dengan kewenangan yang melekat padanya. Persepsi dan interpretasi yang bermacam-macam diperlukan pengkajian, pengendapan, dan pemaknaan sebagai upaya pemahaman bersama dan kaji ulang terhadap makna undang-undang tersebut.

Bagaimanapun pemahaman yang benar atas makna Otonomi Daerah ini akan membawa pengaruh terhadap terjadinya perubahan kerangka pikir dalam pembangunan. Pada hakikatnya otonomi daerah mencakup tiga hal penting, yaitu **good governance**, kemandirian, dan komplementasi. Salah satu dari tiga hal itu adalah pemerintahan yang baik dan bersih (**good governance**) memerlukan tiga syarat penting, yaitu berpihak pada rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. Tiga syarat inilah yang wajib dipenuhi oleh segenap aparatur pemerintah dengan cara menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang tengah terjadi.

Salah satu indikator kesiapan suatu daerah menghadapi implementasi Otonomi Daerah adalah tersedianya sumber daya di daerah itu, baik sumber daya alam, lingkungan, maupun terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu potensi sumber daya yang tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan sekaligus dapat digunakan sebagai parameter penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat dalam implementasi kebijakan itu. Pada umumnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman yang baik atas konsep dan makna otonomi daerah, akan berpengaruh sangat positif bagi masyarakat di daerah itu. Sebaliknya

jika pemahaman atas konsep Otonomi Daerah sangat dangkal, maka akan berpengaruh pula pada kehidupan masyarakat di daerah itu.

Perubahan kerangka pikir dalam pembangunan yang melibatkan aparatur pemerintahan daerah sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat di daerah itu. Posisi dan fungsi aparatur pemerintah yang semula merupakan '*pangreh praja*' menjadi '*pamong praja*' merupakan pengejawantahan makna dari memerintah menjadi fasilitator. Kondisi ini memerlukan dukungan luas dari segenap lapisan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itulah diperlukan upaya pemerintah untuk membangkitkan motivasi segenap lapisan masyarakat dalam program-program pembanguan di daerah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Salah satu upaya untuk membangkitkan motivasi masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran atas wawasan kebangsaan, rasa kebanggaan daerah, dan rasa *handarbeni* / 'memiliki' daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangkitan motivasi ini, antara lain dengan mengadakan studi tentang penelusuran harijadi dan penyusunan konsep pengembangan budaya masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya motivasi masyarakat itu.

Secara ringkas gambaran awal tentang kondisi masyarakat Kabupaten Temanggung terhadap dukungan dan motivasi pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, and threaten*) berikut ini.

a. Kekuatan (*Strength*)

- Kabupaten Temanggung sangat dikenal luas dengan masyarakatnya yang hidup bertanam tembakau atau pertanian dan sangat religius, sehingga dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat terjadi jika dijumpai atau dapat diciptakan

sebuah 'alat' atau sarana pemersatu atau penggerak pembangunan.

- Kekayaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan kekuatan dasar bagi implementasi kebijakan Otonomi Daerah, terutama jika juga diimbangi dengan kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai potensi sumber daya manusia.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Kondisi alam dan lingkungan Kabupaten Temanggung yang sangat subur mengakibatkan lemahnya etos kerja sebagian masyarakat, karena merasa sudah dapat dipenuhi kebutuhannya oleh tersedianya sumber daya alam.
- Alat dan perangkat pembangkit motivasi yang tersedia ternyata belum mampu mendorong motivasi secara optimal untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk Harijadi yang telah ditetapkan. Harijadi itu bahkan tidak begitu populer di kalangan masyarakat, apalagi menimbulkan rasa bangga untuk dapat mendorong rasa memiliki daerah.

c. Peluang (*Opportunities*)

- Meningkatnya infrastruktur di daerah ini sebagai akibat meluasnya teknologi informasi, sehingga mendorong terjadinya kemudahan dalam mengakses informasi.
- Meningkatnya kemampuan mengakses informasi memberikan motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya, sehingga dapat mendorong dalam berkontribusi dalam pembangunan daerah.
- Kekayaan sumber daya alam dapat mendorong penyediaan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Ancaman (*Threaten*)

- Pemahaman yang salah atas Otonomi Daerah dapat menimbulkan sentimen etnis atau kedaerahan, sehingga dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.
- Interpretasi yang tidak tepat dapat mengubah arogansi sektoral yang terjadi sebelumnya menjadi arogansi regional, sehingga semakin menjauhkan dari hakikat Otonomi Daerah.

Sesuai dengan temuan awal di atas, maka diperlukan suatu kajian yang dapat menghasilkan sebuah perangkat untuk membangkitkan motivasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan daerah. Penelusuran kembali Harijadi Kabupaten Temanggung yang dapat memberikan rasa bangga, menumbuhkan motivasi, rasa patriotisme kejuangan, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional, dan rasa memiliki daerah diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan.

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung yang menjadi titik sentral dari dilaksanakannya sebuah proses Perencanaan Strategis pembangunan Kabupaten Temanggung, untuk jangka waktu lima tahun periode tahun 2002 -2006 adalah "**MENUJU TEMANGGUNG YANG LEBIH SEJAHTERA SEJUK DINAMIS DAN AGAMIS**"

Pernyataan VISI tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- (1) **LEBIH SEJAHTERA** artinya seluruh penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung harus dapat menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini, meliputi peningkatan ekonomi, berupa pemenuhan kebutuhan pokok hidup

seperti pangan, sandang, papan/perumahan dan kesempatan memperoleh kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas pribadi seperti pendidikan, pelayanan kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan batin yang bersifat kejiwaan dan religius.

- (2) **SEJUK** yaitu terciptanya hubungan yang harmonis, saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi demokrasi antar segenap elemen masyarakat dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) **DINAMIS** yaitu dapat mengikuti dan menikmati perkembangan yang ada baik politik, ekonomi, maupun kemajuan teknologi serta tidak ketinggalan dengan daerah lain dalam pergaulan secara nasional maupun internasional.
- (4) **AGAMIS** mengandung pengertian bahwa meskipun sudah lebih sejahtera, kondisi dan situasinya sejuk, bersifat maju dan dinamis namun tetap tidak meninggalkan norma dan ajaran agama dan melestarikan nilai-nilai spiritual serta budaya luhur bangsa. Dengan pengertian lain meskipun di masa datang Visi tersebut dapat dicapai dalam tata cara tertentu, namun manusia Temanggung tetap sadar akan kerendahan kemanusiaanya sebagai bagian kecil dari makrokosmos alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT; Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai VISI tersebut, maka dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban EMPAT MISI utama yaitu :

- (1) **MISI PERTAMA** ; Mempertahankan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya rasa aman, tertib, damai dan tentram yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menghormati serta saling menghargai.

- (2) **MISI KEDUA** ; Meningkatkan dan memberdayakan perekonomian rakyat, yang bertumpu pada pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial masyarakat.
- (3) **MISI KETIGA** ; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang dilandasi oleh semangat pengamalan nilai-nilai, ajaran serta norma-norma keagamaan.
- (4) **MISI KEEMPAT** ; Mengembangkan Kapasitas dan Kelembagaan Aparatur Pemerintah dalam rangka Memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Materi dalam naskah penelusuran Harijadi ini diharapkan dapat menggambarkan aspirasi masyarakat tentang jatidiri daerahnya, sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya secara teknis aspirasi ini dapat diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penetapan Harijadi Kabupaten Temanggung.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Kegiatan Penelusuran Kembali Harijadi dan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Temanggung ini ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan motivasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pengenalan dan pembangkitan jatidiri masyarakat.
- b. Menemukan harijadi yang dapat membangkitkan semangat kejuangan warga masyarakat, jatidiri, mempertebal harga diri,

sehingga dapat menjadi penggerak perwujudan cita-cita pembangunan.

- c. Menyusun konsep pengembangan kebudayaan daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan keinginan masyarakat.

2. Sasaran

Studi ini diharapkan dapat mewujudkan tersusunnya naskah materi hasil penelusuran kembali Harijadi Kabupaten Temanggung yang memenuhi kriteria sebagai gambaran aspirasi warga masyarakat dengan pendekatan pengembangan kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan. Pada gilirannya jika naskah ini sudah teruji dan tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dapat menjadi pengganti penetapan terdahulu yang kurang memberikan pengaruh dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

C. LINGKUP PEKERJAAN

1. Profil Sejarah Kabupaten Temanggung

Salah satu hasil langsung studi ini antara lain adalah tersusunnya naskah penulisan sejarah Kabupaten Temanggung yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan kurun waktu yang panjang sejak masa awal hingga kini.

2. Kriteria Penetapan Harijadi Kabupaten Temanggung

Sesuai dengan hasil survei lapangan maupun kepustakaan diharapkan dapat disajikan berbagai kriteria Harijadi yang sesuai dengan aspirasi warga masyarakat Temanggung, sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi penetapan Harijadi. Kriteria ini

sangat penting sebagai perwujudan kesepakatan atau hasil musyawarah warga masyarakat seluas-luasnya.

3. Alternatif Kriteria Penetapan Harijadi Kabupaten Temanggung

Sebagai hasil akhir studi ini diharapkan dapat melahirkan beberapa alternatif penentuan Harijadi Kabupaten Temanggung disertai argumentasi, sehingga dapat membantu penentuan pilihan penetapan Harijadi.

4. Konsep Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Temanggung

Studi ini diharapkan juga dapat menghasilkan Konsep Pengembangan Kebudayaan yang sesuai dan cocok dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung dengan cara menyajikan berbagai pendekatan pengembangan kebudayaan.

D. METODE PENELITIAN

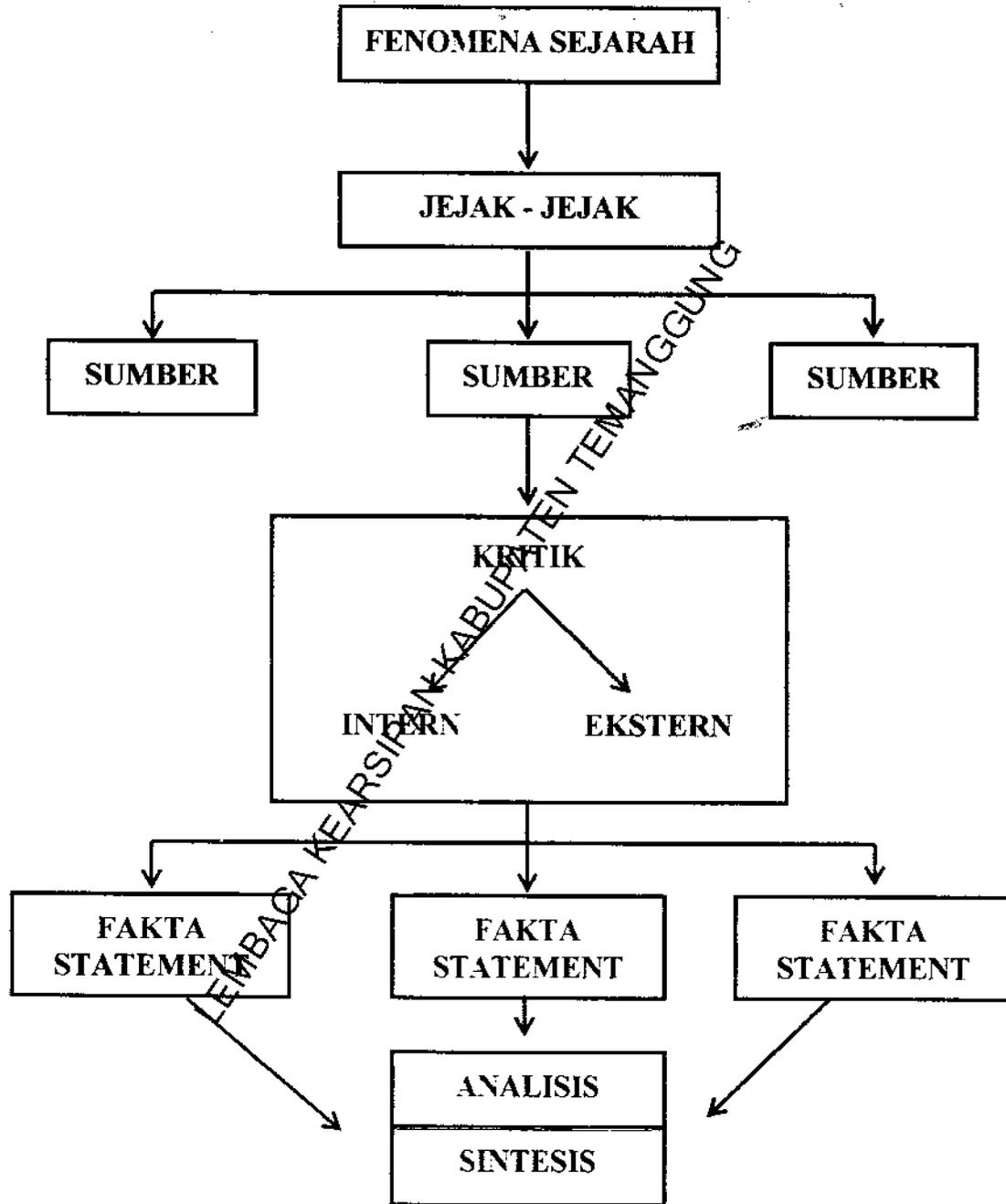
Sesuai dengan tema dan tujuan penelitian ini untuk menyusun Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Temanggung sebagai bahan Penetapan Harijadi, maka metode yang digunakan adalah "Metode Penelitian Sejarah (Historis)". Pemilihan metode ini memberikan konsekuensi terhadap pemilihan bahan, tata cara, dan tata laksana pelaksanaan dan penyajiannya. Di antara berbagai model penelitian sejarah yang sudah dikenal, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif-naratif atau yang dikenal dengan sebutan *Sejarah Konvensional*. Tipe sejarah ini merupakan suatu rekonstruksi peristiwa-peristiwa di masa lampau dalam kerangka urutan waktu (*evenement*).

Tipe penelitian sejarah seperti ini membawa konsekuensi metodologis, yaitu menggunakan metode penalaran induktif. Metode ini bergerak dari kajian fakta-fakta atau gejala khusus untuk kemudian disimpulkan sebagai gejala yang bersifat umum atau generalisasi empirik (Tanudirjo, 1988). Oleh karena itu tahap penelitian ini diawali dengan pengumpulan data melalui observasi empirik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disintesis, dan akhirnya ditarik kesimpulan atau generalisasi. Semakin banyak data yang dikumpulkan, kesimpulan yang ditarik semakin mendekati kebenaran (Mundardjito, 1986). Penelitian dengan penalaran seperti ini tidak membangun hipotesis, sehingga kerangka pikir/dasar pemikiran sekadar digunakan sebagai pemandu dalam pembahasan agar permasalahannya lebih terarah.

Secara umum tata alir model penelitian sejarah adalah seperti tergambar pada bagan alir di bawah ini.

LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Gambar 1.1. Tata Alir Metode Penelitian Sejarah

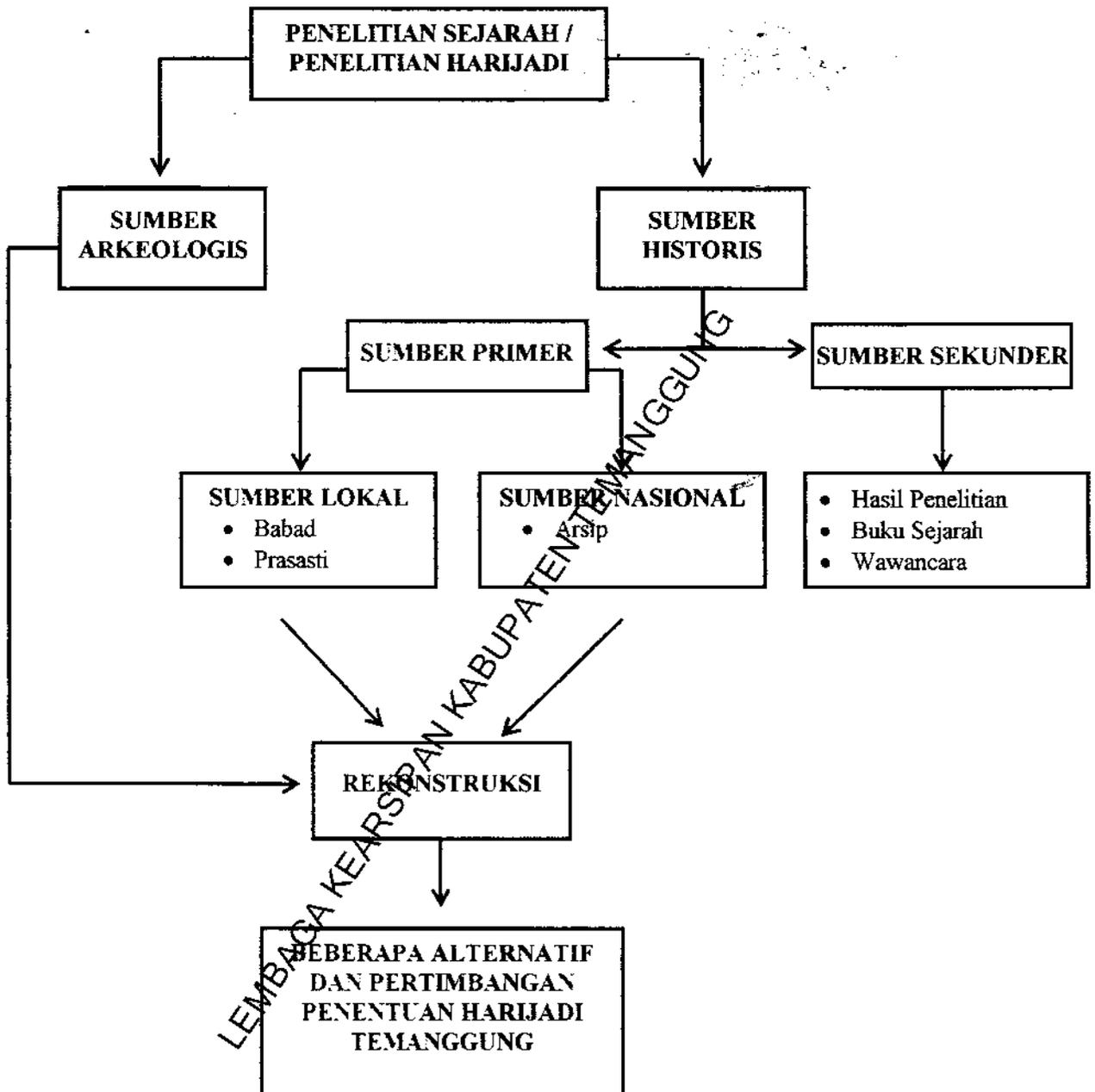


Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa suatu fenomena sejarah hanya dapat diketahui melalui jejak-jejak yang ditinggalkannya. Jejak-jejak itu terkumpul dalam bentuk sumber-sumber, baik tertulis (*tekstual*) maupun artefaktual. Sebagai bahan penelitian ilmiah maka sumber-sumber, harus melalui tahapan kritik, baik intern terhadap inti isi sumber itu maupun secara ekstern terhadap bahan dan status sumber itu (*autentisitas*). Hasil penilaian terhadap kritik sumber itu akan melahirkan fakta-fakta historis yang selanjutnya diadakan analisis dan sintesis sesuai dengan tujuan penelitian (sejarah)nya. Dengan tata laksana seperti ini secara langsung dapat diketahui tingkat kredibilitas kesaksian suatu sumber, sehingga dapat diketahui tingkat kualitasnya dalam suatu rekonstruksi sejarah.

Di dalam penyajian suatu karya rekonstruksi sejarah atau historiografi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, perspektif, dan teori-teori tertentu sehingga tidak kering dan dapat menghidupkan kisah itu dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun demikian untuk kepentingan penelitian Sejarah Kabupaten Temanggung seperti telah disebut di muka, tidak dilakukan perumusan hipotesis dan penentuan pilihan pendekatan tertentu karena alasan tujuan penelitian ini sebagai bahan penentuan Harijadi. Oleh karena itu tahapan penelitian Sejarah Kabupaten Temanggung akan melalui tahapan-tahapan sebagai tergambar pada bagan di bawah.

Berdasarkan bagan tersebut, alur penelitian sejarah dalam rangka penentuan Harijadi Kabupaten Temanggung mempunyai sasaran ganda, yaitu suatu rekonstruksi sejarah Kabupaten Temanggung dan bahan penentuan Harijadi Temanggung. Di dalam usaha merekonstruksi sejarah Kabupaten Temanggung akan digunakan sumber arkeologis dan sumber historis (termasuk sumber dari naskah klasik), baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dengan demikian seluruh potensi yang dimiliki Temanggung akan diakomodasikan dalam rekonstruksi sejarahnya, tanpa meninggalkan satu sumberpun yang berhasil dijangkau dalam pengkajian ini. Oleh karena itu dapat terjadi rekonstruksi sejarahnya lebih lengkap dibandingkan dengan bahan penentuan harijadi; atau dengan kata lain bahan penentuan harijadi diambil dari sebagian hasil rekonstruksi sejarah.

Gambar 1.2. Tahapan Penelitian Sejarah Kabupaten Temanggung



Dengan tahapan penelitian seperti tersebut di atas, maka hasil yang ingin dicapai dalam pengkajian ini adalah suatu rekonstruksi sejarah Kabupaten Temanggung yang lengkap berdasarkan sumber-sumber yang tersedia dan sekaligus ditemukan bahan-bahan pertimbangan sebagai alternatif penentuan harijadi Kabupaten Temanggung. Secara khusus hasil-hasil itu akan diorganisasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penelitian, Hasil yang diharapkan, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini.

Bab II Hasil Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber-sumber arkeologis dan historis yang dapat dijangkau dalam pengkajian ini, antara lain artefak, babad-babad, Arsip Pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.

Bab III Beberapa Alternatif sebagai bahan pertimbangan Penentuan Harijadi Temanggung, yang terdiri atas usulan Kriteria Harijadi bagi daerah ini dan beberapa fakta Surat Penetapan berkenaan dengan Kabupaten Temanggung.

Bab IV Konsep-Konsep Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Temanggung : yang terdiri atas konsep-konsep pendekatan tentang pemberdayaan peran masyarakat dan pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil kebudayaan di Kabupaten Temanggung.

Bab V Kesimpulan sebagai pertanggungjawaban hasil pengkajian terhadap Sejarah Temanggung dan saran-saran yang diperlukan dalam rangka Penetapan Harijadi Temanggung. Sebagai kelengkapan buku ini juga akan disertakan beberapa petikan *Besluit* dan beberapa Silsilah yang pernah disusun oleh para pengamat dan pemerhati terdahulu, serta Silsilah hasil rekonstruksi Tim Peneliti saat ini.

BAB II

REKONSTRUKSI SEJARAH TEMANGGUNG

A. SUMBER SEJARAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama tempat Temanggung belum dapat diketahui dengan pasti berasal dari kata dasar atau istilah apa, tetapi berdasarkan bunyi kata '*temanggung*' tidak jauh dari ucapan '*temenggung*' atau '*tumenggung*', yaitu suatu jabatan bagi penguasa kadipaten/kabupaten pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Jawa. Wilayah kadipaten / kabupatennya pada waktu itu disebut Kedu. Tempat tinggal/alamat pimpinan kadipaten/kabupatennya adalah di Kota Temanggung yang sekarang; yang pada waktu itu disebut "*ka-tumenggung-an*". Pendapat lain mengatakan bahwa temanggung berasal dari kata dasar "*tanggung*", artinya yang berani menanggung atau berani bertanggung jawab. Implikasi dari arti ini adalah bahwa yang berani menanggung atau '*sing wani nyangga*' (Bhs. Jawa) itu biasanya kaum perempuan. Oleh karena itu temanggung harus diberi makna sebagai '*ibu pertiwi*', yaitu setiap aktivitas dan pengabdian harus dikembalikan kepadanya.

Sebagai bahan penulisan sejarah Kabupaten Temanggung, sekurang-kurangnya terdapat dua jenis sumber utama, yaitu yang bersifat artefaktual dan tekstual. Sumber artefaktual terdiri atas sisa-sisa bangunan dan benda buatan manusia lainnya, baik yang menjadi koleksi pribadi maupun yang disimpan dan dipelihara oleh instansi pemerintah. Berbagai jenis artefak misalnya candi, arca, yoni, lingga, masjid, makam, gedung-gedung kuna, dapat dijadikan sumber sejarah Temanggung. Sumber-sumber tekstual antara lain berupa prasasti, babad, catatan harian, kisah perjalanan, dan surat-surat keputusan.

Sumber-sumber sejarah itu akan dieksplorasi secara maksimal dan diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan, karena sejarah yang akan ditulis mencakup kurun waktu yang sangat panjang, yaitu dari masa klasik di Indonesia sampai dengan masa pembangunan Kabupaten Temanggung. Sumber-sumber artefaktual dan tekstual yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah.

1. Sumber- Sumber Artefaktual

Beberapa di antara bangunan kuna yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Temanggung adalah sebagai berikut.

a. Candi Pringapus

Candi ini terletak di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Candi Pringapus berada di atas lahan berbukit dengan kemiringan landai, di antara areal pemukiman penduduk yang cukup padat. Lingkungan sekitar candi didominasi oleh lahan persawahan padi. Candi ini terletak pada koordinat E 68° S 07° 14' 54,4" E 110° 03' 02,7" dengan elevasi : 602 m. Wilayah Candi Pringapus mempunyai udara sejuk karena terletak di daerah lereng perbukitan antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, sehingga menyenangkan untuk tempat wisata. Kondisi tanah di sekitar Candi Pringapus cukup subur, hal ini terlihat dari lahan persawahan padi yang menghampar di wilayah desa Pringapus. Kesuburan tanah tersebut didukung dengan adanya sumber air yang melimpah. Di dekat Candi Pringapus terdapat sendang yang menjadi sumber pengairan bagi warga sekitar terutama persawahan.

Sebelum candi itu ditemukan tempat itu merupakan bentangan tanah yang ditumbuhi tanaman bambu yang lebat. Oleh masyarakat sekitar ditemukan batu-batu yang merupakan bagian dari bangunan candi di tanah yang ditumbuhi bambu. Masyarakat menyebut bangunan candi itu dengan nama yang sesuai dengan ketika awal mulanya ditemukan yaitu ditumbuhi oleh jenis bambu pringapus. Candi yang tertutup oleh

jenis bambu itu lalu diberi nama sesuai dengan nama jenis bambunya yaitu Candi Pringapus.

Kepercayaan masyarakat di sekitar Candi Pringapus sudah begitu lekat dengan adanya keberadaan candi, karena dianggap sebagai pepunden desa oleh masyarakat. Suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat apabila waktu bertepatan dengan bulan Jawa *ruwah*, masyarakat mengadakan upacara *nyadran* yang ditempatkan di halaman candi. *Nyadran* ini dilakukan bersama-sama secara kekeluargaan oleh masyarakat. Upacara *nyadran* adalah suatu tradisi masyarakat Jawa yang masih memegang kepercayaan bersih kubur. Kepercayaan bersih kubur ini ditujukan untuk menghormati arwah leluhur agar mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Upacara penghormatan dan doa atas arwah leluhur sudah ada sejak zaman kuna sebelum Hindu datang di Nusantara. Setelah Hindu dan Islam datang, upacara ini tetap dilanjutkan disesuaikan dengan zamannya. Orang-orang yang mengikuti upacara *nyadran* tidak hanya datang dari wilayah Dusun Pringapus, tetapi juga datang dari tetangga dusun terdekat.

Selain tradisi *nyadran*, masyarakat Dusun Pringapus mempunyai tradisi semacam selamatan yang dilaksanakan di lingkup halaman candi. Selamatan ini dilakukan apabila seseorang warga desa akan mengadakan hajatan, biasanya menjelang pernikahan. Ada juga warga desa perempuan yang telah hamil 5 bulan mengadakan selamatan di dalam ataupun di sekitar halaman candi. Biasanya selamatan ini dilakukan secara sendiri-sendiri oleh warga yang bersangkutan dengan memanjatkan doa yang diucapkan di dalam candi. Dalam selamatan ini biasanya warga memberikan semacam sesaji yang berupa nasi diletakkan dalam kuali atau periuk dan ditambahkan jajan pasar. Sesaji ini ditaruh di dalam candi dan kemudian diambil oleh warga yang mengadakan selamatan. Masyarakat setempat menyebut tradisi semacam ini dengan nama *keblokan*.

Candi Pringapus secara keseluruhan berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter, sedangkan ukuran candi panjang 5,19 meter, lebar 4,83 meter, dan tinggi 6,64 meter. Keberadaan Candi Pringapus dapat dikaitkan dengan prasasti yang ditemukan di dekat wilayah candi, yaitu Prasasti Tulang Air I dan II.

Di sekitar Candi Pringapus banyak ditemukan batu-batu candi yang oleh warga masyarakat dikumpulkan di halaman candi. Temuan itu berupa yoni, arca *Durga Mahesâsuramardhini*, relief kala pada ambang atas pintu candi, batu berhias / berrelief merupakan bagian dinding candi, dan sebagian besar batu persegi komponen tubuh candi.

b. Candi Perot

Candi ini masih terletak dalam satu wilayah dusun dengan Candi Pringapus, Kecamatan Ngadirejo. Sekarang kondisi Candi Perot sudah sulit untuk dilacak keberadaannya. Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan guru kunci Candi Pringapus, sebagian besar batu-batu Candi Perot dikumpulkan di halaman Candi Pringapus. Kesulitan melacak keberadaan Candi Perot disebabkan karena lokasi tanahnya ditumbuhi tanaman-tanaman lebat.

c. Sendang Endong Sewu

Sendang ini terletak satu garis sejajar dengan Candi Pringapus dan Candi Perot, termasuk Dusun Pringapus, Kecamatan Ngadirejo. Sendang Endong Sewu merupakan sumber mata air yang cukup penting bagi warga Desa Pringapus. Kegunaan air dari Sendang Endong Sewu yang utama adalah untuk kepentingan pengairan atau irigasi. Kondisi Dusun Pringapus dibandingkan dusun-dusun lainnya terlihat perbedaan dalam hal penyediaan air, karena mendapat pasokan air yang cukup melimpah dari sumber air Sendang Endong Sewu. Selain itu warga sekitar menggunakan air sendang untuk keperluan mencuci dan kebutuhan lainnya. Sendang Endong Sewu

berada pada koordinat : E 70° S 07°14' 55,4" E110° 02' 55,0" dengan elevasi : 620 m. Di pinggir sendang terdapat arca Nandi yang menghadap ke sisi dalam sendang. Ukuran Sendang Endong Sewu adalah panjang 50,1M dan lebar 28,6 M

d. Candi Setapan

Candi Setapan terletak di Kecamatan Parakan, di dekat lapangan desa setempat. Candi ini berada pada koordinat : W273° S 07°15' 33,3" E110° 05' 16,9" dengan elevasi 637,0M. Menurut cerita masyarakat sekitar, Candi Setapan merupakan tempat untuk bersemedi (bertapa) bagi orang yang mempunyai keinginan tertentu. Biasanya orang-orang yang bersemedi di Candi Setapan justru berasal dari daerah luar desa.

Candi Setapan terletak di tanah berteras/berbukit dengan kemiringan landai. Denah kompleks Candi Setapan berbentuk memusat ke belakang, dengan halaman candi bagian depan lebih luas daripada halaman belakang. Candi Setapan mempunyai halaman yang berieras, yaitu model berundak dengan dua jalan menuju candi, yakni dari arah depan dan sisi kiri.

e. Candi Roto

Situs Candi Roto sudah tidak dapat lagi dilihat bentuknya sebagai candi, kecuali yang masih tersisa berupa dua buah arca dan sebuah batu candi. Peninggalan ini dikumpulkan di dekat Puskesmas Kecamatan Candiroto yang jaraknya sekitar 200 M dari jalan raya. Lokasi situs Candi Roto berada pada koordinat : N11° S 07°10' 28,1" E110° 03' 51,8" dengan elevasi 624 M. Kumpulan tinggalan ini dikumpulkan di bawah pohon beringin. Hasil identifikasi dari tinggalan itu adalah sebuah arca *nandi* dengan kepala terbelah, sebuah arca Durga, dan sebuah batu relief candi.

Selain itu di segenap wilayah di Kabupaten Temanggung juga ditemukan sejumlah yoni yang letaknya tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

2. Sumber- Sumber Tekstual

a. Sumber - Sumber Tekstual Prasasti

Sumber-sumber tertulis di Kabupaten Temanggung terutama berasal dari masa sejarah Kerajaan Mataram Kuna. Secara keseluruhan daftar prasasti yang pernah ditemukan di Temanggung dan yang menyebut nama tokoh sama atau sezaman seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Prasasti Yang Ditemukan di Kabupaten Temanggung

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun		Referensi
		Caka	Masehi	
1.	Tulang Air	890	828	J.G. de Casparis, 1952
2.	Gondosuli I	754	832	J.G. de Casparis, 1952
3.	Gondosuli II	754	832	J.G. de Casparis, 1952
4.	Sucen	764	843	N.B.G. , 26, 1888, 21
5.	Siwagrha	778	856	J.G. de Casparis, 1952, hlm. 218.
6.	Wanua Tengah	785	863	J.L.A. Brandes, OJO , 1913, VIII, hlm. 10.
7.	Wanua Tengah II	785	863	N.J. Krom, TBG , 53, 1911, hlm. 243.
8.	Télahap	820	898	Boechari, MISI , II/2, 1964. W.F. Stutterheim, INI , 1940, hlm. 13.
9.	Watukura I	824	902	Van Naersen, 1941, hlm. 82-105. J.L.A. Brandes, 1913, OJO , XXIV, hlm. 31-32.
10.	Watukura II	-	-	Van Naersen, 1941, IX.
11.	Watukura III	-	-	Van Naersen, 1941, X.
12.	Kandangan	828	906	J.L.A. Brandes, OJO , 1913, XXV, hlm. 32-33.
13.	Mantyasih I	829	907	W.F. Stutterheim, TBG 67, 1927, hlm. 205-212.
14.	Mantyasih II	829	907	J.L.A. Brandes, 1913, OJO , XXVII, hlm. 35-36.
15.	Mantyasih III	-	-	J.L.A. Brandes, 1913, OJO ,

Selain itu di segenap wilayah di Kabupaten Temanggung juga ditemukan sejumlah yoni yang letaknya tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

2. Sumber- Sumber Tekstual

a. Sumber - Sumber Tekstual Prasasti

Sumber-sumber tertulis di Kabupaten Temanggung terutama berasal dari masa sejarah Kerajaan Mataram Kuna. Secara keseluruhan daftar prasasti yang pernah ditemukan di Temanggung dan yang menyebut nama tokoh sama atau sezaman seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Prasasti Yang Ditemukan di Kabupaten Temanggung

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun		Referensi
		Caka	Masehi	
1.	Tulang Air	790	828	J.G. de Casparis, 1952
2.	Gondosuli I	754	832	J.G. de Casparis, 1952
3.	Gondosuli II	754	832	J.G. de Casparis, 1952
4.	Sucen	764	843	N.B.G. , 26, 1888, 21
5.	Siwagrha	778	856	J.G. de Casparis, 1952, hlm. 218.
6.	Wanua Tengah	785	863	J.L.A. Brandes, OJO , 1913, VIII, hlm. 10.
7.	Wanua Tengah II	785	863	N.J. Krom, TBG , 53, 1911, hlm. 243.
8.	Télahap	820	898	Boechari, MISI , II/2, 1964. W.F. Stutterheim, INI , 1940, hlm. 13.
9.	Watukura I	824	902	Van Naersen, 1941, hlm. 82-105. J.L.A. Brandes, 1913, OJO , XXIV, hlm. 31-32.
10.	Watukura II	-	-	Van Naersen, 1941, IX.
11.	Watukura III	-	-	Van Naersen, 1941, X.
12.	Kandangan	828	906	J.L.A. Brandes, OJO , 1913, XXV, hlm. 32-33.
13.	Mantyasih I	829	907	W.F. Stutterheim, TBG 67, 1927, hlm. 205-212.
14.	Mantyasih II	829	907	J.L.A. Brandes, 1913, OJO , XXVII, hlm. 35-36.
15.	Mantyasih III	-	-	J.L.A. Brandes, 1913, OJO ,

No.	Nama Prasasti	Angka Tahun		Referensi
		Caka	Masehi	
16.	Rukam	829	907	CVIII, hlm. 240-242. Titi Surti Nastiti, dkk., 1983, hlm. 23-26.
17.	Wanua Tengah III	830	908	Djoko Dwiyanto, PIA IV, 1986, hlm. 92-108.

Sumber : Olahan Studio 2003

Beberapa prasasti di atas yang menjadi latar belakang sejarah dan relevan dengan keberadaan Temanggung akan dikutip seperlunya

b. Sumber - Sumber Tekstual Babad

Naskah "Babad Kedu" No. PBC 184 tersimpan di Museum Sana Budaya Yogyakarta menyebutkan silsilah bupati Kedu. Dalam naskah ini disebutkan secara jelas bahwa Bupati Kedu sampai zaman Paku Buwana III dan Paku Buwana IV di Kasunanan Surakarta atau Hamengku Buwana I dan II di Kasultanan Yogyakarta merupakan keturunan Raja Brawijaya di Majapahit (abad ke-15). Setelah zaman-zaman itu kata jabatan "Bupati Kedu" pada nama yang bergelar "Tumenggung" tidak disebutkan secara jelas. Uraian silsilah itu sebagai berikut.

Raja Majapahit yaitu Brawijaya yang terakhir (abad ke-15) mempunyai anak 114 orang. Anak yang ke-30 bernama Raden Jaka Antar/Raden Arya Suwangsa. Ia menjadi mukmin, berguru kepada Pangeran Pujangga masuk agama Islam bergelar Pangeran Sinembah, dan tinggal di Kedu, Ketintang. Di Kedu, Ketintang ini ia bergelar Kiai Ageng Wot Sinom.

Kiai Ageng Wot Sinom mempunyai dua istri. Istri tua bernama Rara Kasihan, anak Arya Pandaya, Bupati Tamping di Pengging. Istri yang muda bernama Nyai Ageng Wuragil, anak Pangeran Pujangga. Dari masing-masing istri ia mendapatkan seorang anak. Anak dari perkawinannya dengan istri tua bernama Kiai Wangsagati/Kiai Ageng

Sleseh. Kiai Ageng Sleseh kemudian berpindah ke Demak. Di Demak bernama Kiai Ageng Samak.

Kiai Ageng Samak mempunyai dua istri. Dari masing-masing istri ia mendapatkan seorang anak. Anak dari perkawinannya dengan istri tua bernama Kiai Citra Gati/Panembahan Sarasah. Panembahan Sarasah tinggal dan dimakamkan di Leyangan, Kedu.

Panembahan Sarasah mempunyai dua istri. Istri yang muda anak Kiai Bodho Mekukuhan. Kiai Bodho Mekukuhan tinggal dan dimakamkan di Dusun Sekruwa, Kedu. Dari masing-masing istri ia mendapat seorang anak. Anak dari perkawinannya dengan istri yang muda bernama Kiai Mirmagati/Kiai Ageng Kalinangka/Kiai Ageng Panggung Ening II/Kiai Lempuyang bertempat tinggal di Dusun Lempuyang, Kedu.

Kiai Ageng Kalinangka kawin dengan anak perempuan Kiai Ageng Panggung Ening I mempunyai seorang anak bernama Nyai Ageng Lempuyang. Nyai Ageng Lempuyang diperistri Raden Tranggana/Panembahan Bodho mempunyai dua anak. Anak yang kedua bernama Kiai Wangsamanggala/Kiai Gedhe Seda Toyajuma.

Kiai Wangsamanggala beristrikan dengan anak perempuan Adipati Urawangsendhi mempunyai lima anak. Anak yang sulung bernama Nyai Cakradirana II (istri Kiai Cakradirana II) bertempat tinggal di Desa Tumpeng.

Perkawinan Nyai Cakradirana II dengan Kiai Cakradirana II mempunyai sembilan anak. Anak kelima perempuan bernama Nyai Wangsamanggala III bersuamikan Kiai Ranagati. Perkawinan Kiai Ranagati dengan Nyai Wangsamanggala III menurunkan seorang anak bernama Kiai Wangsacitra/Tumenggung Mangkuyuda I. **Tumenggung Mangkuyuda I adalah Bupati Kedu I**

Tumenggung Mangkuyuda I beristrikan anak perempuan Kiai Banten mempunyai dua anak. Anak yang sulung bernama Bagus Lembu bergelar **Tumenggung Mangkuyuda II, Bupati Kedu II.**

Tumenggung Mangkuyuda II mempunyai istri tiga. Istri pertama anak **Sunan Amangkurat I (1645-1677)** dari Mataram. Istri kedua anak Arya Panularan dari Mataram. Istri ketiga anak Raden Ranga Sura Adimanggala III dari Lepen Tangi. Dari masing-masing istri ia mendapatkan seorang anak. Perkawinannya dengan istri pertama menurunkan **Tumenggung Mangkupraja, Bupati Kedu III.** Perkawinannya dengan istri ketiga menurunkan **Tumenggung Mangkuyuda III, Bupati Kedu IV.** Mangkuyuda III diperkirakan sebagai Bupati Kedu pada masa pemerintahan Paku Buwana III (1749-1788) di Kasunanan Surakarta dan Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792) di Kasultanan Yogyakarta. Perkawinannya dengan istri kedua menurunkan **Tumenggung Mangkuyuda IV, Bupati Kedu V.** Tumenggung Mangkuyuda IV diperkirakan sebagai Bupati Kedu pada masa pemerintahan Paku Buwana IV (1788-1820) di Kasunanan Surakarta dan Sultan Hamengkubuwana II (1792-1828) di Kasultanan Yogyakarta.

Setelah Tumenggung Mangkuyuda IV dalam "Babad Kedu" tidak muncul Tumenggung Mangkuyuda V. Nama yang muncul adalah Tumenggung Natayuda I sampai dengan Tumenggung Natayuda V. Tetapi dalam nama Tumenggung Natayuda I-V tidak disebutkan secara eskplisit jabatan Bupati Kedu. Tampaknya setelah masa pemerintahan Bupati Kedu Tumenggung Mangkuyuda IV lalu diteruskan dengan "Resolusi Nomor 4 tanggal 10 Nopember 1834 tentang pembentukan Kabupaten Temanggung oleh Belanda dengan bupatinya Raden Tumenggung Ario Djojo Negoro (1834-1848) dan dilanjutkan dengan Raden Adipati Ario Holand Soemodilogo (1848-1878). Bupati-bupati selanjutnya bisa dilihat pada halaman selanjutnya.

Selain sumber tertulis berupa prasasti dan babad, sumber tertulis lainnya berupa *besluit* yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menetapkan kepala daerah pada masa itu dan Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) dalam rangka penetapan kepala daerah sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Masa Kerajaan Mataram Kuno

Rekonstruksi kehidupan manusia semakin lebih jelas ketika ditemukan sumber-sumber sejarah yang berupa tulisan-tulisan atau yang lazim disebut dengan prasasti. Prasasti-prasasti tertua selain ditemukan di Kutai Kalimantan Timur dan Jawa Barat, juga ditemukan di Jawa Tengah. Prasasti tertua di Jawa Tengah ditemukan di desa Dakawu, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan dikenal dengan nama prasasti Tuk Mas. Prasasti ini meskipun dapat dibaca, tetapi kalimatnya sangat pendek, tidak tercantum angka tahun dan berisi tentang perumpamaan suatu tempat sebagai gambaran seperti sungai Gangga di India. Selanjutnya prasasti lain yang tertua dan memuat angka tahun dengan *candrasengkala* adalah prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Ngluwar, Kabupaten Magelang. Prasasti ini berhuruf Jawa Kuna dan berbahasa Sanskerta, dikeluarkan tahun 654 Saka atau 732 Masehi oleh seorang raja yang bernama Sanjaya. Sejak penemuan prasasti inilah rekonstruksi sejarah Jawa Kuna dapat dilakukan lebih lengkap.

Nama Sanjaya ternyata kemudian juga disebut dalam daftar nama raja-raja Mataram Kuno yang dimuat dalam prasasti Mantyasih tahun 907 M dan prasasti Wanua Tengah III tahun 908 M. Kedua prasasti itu sama-sama ditemukan di Temanggung, satu di Kedu dan satu lagi di Kaloran, semakin membuka peluang tersusunnya Sejarah Mataram Kuno di Jawa Tengah. Daftar nama raja atau penguasa yang terdapat pada kedua prasasti ini sekaligus dapat digunakan sebagai pengecekan silang terhadap nama-nama raja yang disebut dalam prasasti lain yang sezaman.

Secara kronologis rekonstruksi Sejarah Mataram Kuno di Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada mulanya rekonstruksi sejarah kerajaan- Mataram Kuno disusun berdasarkan anggapan bahwa di Jawa Tengah pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Sailendra yang beragama Budha dan berasal dari Funan serta dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan asli Indonesia. Rekonstruksi ini didasarkan atas penyebutan sebuah nama dalam prasasti Kalasan tahun 778 M yang berbunyi "*Tejah Purnnapana Panamkarana Çri Maharaja Sailendrawangsatilaka*". Berdasarkan formula nama inilah kemudian dikembangkan sebuah interpretasi bahwa nama pertama adalah raja yang sedang memerintah dan memberikan hadiah sebidang tanah kepada raja Sailendra sebagai lahan untuk membangun candi bagi Dewi Tara di Kalasan. Namun demikian keberatan utama dari rekonstruksi ini adalah kenyataan bahwa nama wangsa Sailendra memang disebut di dalam prasasti dengan formula "*sailendrawangsatilaka*" (permata Dinasti Sailendra), tetapi tidak ada satu prasasti pun yang menyebut Sanjaya sebagai wangsa atau dinasti. Anggapan itu hanya didasarkan atas sebutan nama Sanjaya pada urutan pertama nama raja-raja yang disebut dalam prasasti Mantyasih 907 M yang dikeluarkan oleh Balitung. Oleh karena itu rekonstruksi sejarah yang berpangkal pada anggapan adanya dua wangsa di Jawa Tengah ini, sementara waktu ditinggalkan.

Selanjutnya rekonstruksi Sejarah Mataram Kuno disusun berdasarkan asumsi bahwa di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi hanya ada satu dinasti, yaitu dinasti Sailendra yang berasal dari Indonesia dan raja-rajanya ada yang beragama Hindu dan ada pula yang beragama Budha. Asumsi ini didukung oleh dua penemuan baru prasasti di Jawa Tengah, yaitu prasasti Sojomerto dan prasasti Sangkara. Prasasti Sojomerto ditemukan di Batang Jawa Tengah, berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu Kuna, sedangkan prasasti Sangkara ditemukan di Sragen, saat ini dalam koleksi Museum Adam Malik di Jakarta.

Selanjutnya Prasasti Sojomerto menyebut nama Dapunta Selendra, istri, ayah, dan ibundanya. Nama Selendra tidak lain adalah 'peng-Indonesia-an' (pe-Melayu-an) dari kata Sailendra dalam bahasa Sanskerta. Dengan demikian dapat diduga bahwa Dapunta Sailendra adalah "wangsakara" (pendiri dinasti) dari Dinasti Sailendra. Setelah beberapa generasi kekuasaan itu pindah ke tangan Sanjaya yang kebetulan beragama Hindu, seperti tampak dari sebutan yang ada dalam prasastinya. Bukti kedua, yaitu Prasasti Sangkara, juga cukup menarik perhatian karena isinya lebih meneguhkan rekonstruksi sejarah yang terakhir ini. Prasasti ini berada dalam koleksi Museum Adam Malik, berhuruf Jawa Kuna dan berbahasa Sansekerta. Prasasti ini antara lain berisi keterangan tentang perpindahan agama seseorang yang bernama Sangkara dari kebaktiannya kepada Sangkara, menjadi penganut Buddha dengan memberikan anugerah kepada *bhiksusangha*. Hal ini dilakukan setelah ia menyaksikan ayahnya yang sakit dan tidak dapat disembuhkan oleh pendeta gurunya, sehingga ia merasa takut dan menganggap sang guru tidak benar, akhirnya ia mengalihkan bhaktinya kepada Sang Buddha. Nama Sangkara ini diduga keras merupakan *garbhanama* dari Rakai Panangaran, raja yang disebut dalam urutan kedua setelah Sanjaya, sehingga nama lengkapnya adalah *Rakai Panangaran Dyah Sangkara Sri Sanggramadhananjaya*.

Berdasarkan rekonstruksi sejarah di atas dapat diketahui bahwa pada masa Mataram Kuno keberadaan agama Hindu dan Budha tidak perlu harus dipertentangkan, karena pada kenyataannya keduanya selalu dapat hidup berdampingan tanpa menimbulkan permusuhan. Dengan demikian jika sepanjang masa sejarah kerajaan Mataram Kuno ditemukan bukti-bukti yang menyebut nama raja yang beragama Hindu atau Budha hakikatnya adalah yang satu sedang berkuasa, dan yang lainnya menjadi bawahannya, demikian pula sebaliknya.

Sesuai dengan urutan kronologis setelah Dapunta Sailendra melampaui beberapa generasi kemudian kekuasaan berpindah pada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya kemudian ia digantikan oleh Rakai

Panangkaran. Raja ini setelah mangkat kemudian digantikan oleh Rakai Panunggalan dan seterusnya digantikan oleh Rakai Warak, kemudian Rakai Garung. Pada masa ini terdapat prasasti yang menyebut nama Rakai Patapan Pu Palar dan Rakai Patapan Pu Manuku. Meskipun tidak diketahui persamaan antara kedua nama ini dengan Rakai Garung, tetapi mengingat secara kronologis nama tokoh yang menjadi raja selanjutnya adalah Rakai Pikatan, maka dapat diduga kedua nama itu sama dengan nama Rakai Garung.

Selain kedua sebutan nama itu yang dapat diidentifikasi dengan Rakai Garung, sejak masa pemerintahan Rakai Panangkaran juga ditemukan prasasti-prasasti lain yang menyebut nama tokoh yang berbeda dan tidak tercantum dalam daftar nama raja yang dibuat oleh Balitung. Di dalam prasasti Kelurak tahun 782 Masehi misalnya, disebut nama *Sriwirawairiwarawimardana*, yang berarti 'pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira' yang juga dikenal sebagai 'sang permata wangsa Sailendra'. Gelar seperti ini juga dijumpai dalam prasasti Ligor B yang berasal dari pantai barat Semenanjung Malaka (Malaysia). Di dalam prasasti ini disebut nama Raja Wisnu sebagai 'pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada tersisa', dan karena keturunan wangsa Sailendra maka ia bergelar Sri Maharaja. Sebutan seperti ini juga dijumpai di dalam prasasti Nalanda dari raja Dewapaladewa. Prasasti ini menyebut kakek raja Balaputradewa, dengan sebutan Raja Jawa, permata wangsa Sailendra, Sri Wirawairimathana. Ia beranak Samarattungga yang kawin dengan Tara, anak raja Dharmmasetu dari Somawangsa. Dari perkawinan ini lahirlah raja Balaputradewa, raja Sriwijaya, penganut agama Budha, yang telah mendirikan biara di Nalanda, dengan tanah yang telah disediakan oleh raja Dewapaladewa. Berdasarkan identifikasi terhadap nama yang disebut dalam prasasti Kelurak, istilah 'pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira' dapat disamakan dengan Rakai Panangkaran yang juga disebut dalam prasasti Kalasan dan Ratu Baka dengan sebutan *Tejhapurnnapanna Panamkarana*. Menurut prasasti Nalanda, Rakai Panangkaran beranak Samaragrawira yang dapat disamakan dengan

Samarattungga yang disebut dalam prasasti Kayumwungan tahun 746 saka atau 824 Masehi.

Prasasti Kayumwungan yang ditulis dalam dua bahasa, Sanskerta dan Jawa Kuna berisi tentang keterangan raja Samarattungga 'permata wangsa Sailendra' dan anak perempuannya yang bernama Pramodawardhani. Putri ini telah mendirikan bangunan suci agama Budha dengan nama Srimad Wenuwana dan mentahbiskan arca Sri Gananatha di dalamnya. Menurut Poerbatjaraka, Wenuwana itu diidentifikasi dengan Candi Ngawen karena kata 'ngawen' berasal dari kata *ka-awi-an*, yang berarti tempat yang banyak bambunya. Tetapi, tempat keberadaan candi ini di Muntilan sangat jauh letaknya dari Parakan, Temanggung, sehingga lebih baik jika '*srimad wenuwana*' sebaiknya dicari di Parakan, Temanggung juga. Pendapat ini didasarkan atas isi prasasti yang menyebut bahwa candi itu dibangun di desa ini (*iha grame*).

Identifikasi selanjutnya adalah hubungan antara Samarattungga dengan Rakarayan Patapan pu Palar. Dapat diduga bahwa Rakarayan Patapan pu Palar adalah anggota wangsa Sailendra yang tetap menganut agama Siwa (Hindu) dan menjadi kepala daerah yang memiliki daerah '*lungguh*' bernama Patapan. Rakai Patapan sendiri juga membangun bangunan suci di wilayahnya seperti disebut dalam prasasti Sang Hyang Wintang (Gondosuli I). Nama Rakai Patapan ini juga disebut di dalam prasasti Munduan tahun 807 M dan prasasti Tulang Air tahun 850 M dengan nama Pu Manuku. Dengan demikian berdasarkan identifikasi terhadap nama yang disebut dalam prasasti-prasasti lain, diduga Rakai Patapan itu adalah anggota wangsa Sailendra, kemenakan Rakai Panangkaran, sepupu Samarattungga, yang masih setia kepada agama Siwa.

Prasasti Tulang Air yang ditemukan di dekat Candi Perot, Ngadirejo, Temanggung, berisi tentang penetapan sima di desa Tulang Air oleh Rakai Patapan pu Manuku pada hari Minggu Pahing, paringkelan Tungalai, tanggal 15 Juni 850 Masehi. Pada waktu itu yang menjadi raja

adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Peristiwa ini cukup menarik, tetapi juga wajar, karena di dalam Prasasti Wanua Tengah tahun 785 saka (10 Juni 863 M) juga terjadi penetapan sima oleh Rakai Pikatan pu Manuku, sementara yang menjadi raja adalah Rakarayan Kayuwangi pu Lokapala. Oleh karena itu sekali lagi tanpa keraguan bahwa Rakai Patapan pu Palar itu tidak lain adalah Rakai Garung, penguasa yang memerintah sebelum Rakai Pikatan.

Kembali pada Rakai Panangkaran yang berpindah agama menjadi Budha Mahayana, memerintah dalam kurun waktu antara 750 sampai sekitar 792 M. Ia kemudian digantikan oleh Samarattungga. Raja ini, sekurang-kurangnya memiliki dua orang putra. Yang tertua, mungkin putri mahkota, bernama Pramodawardhani dan yang kedua Balaputradewa (dari isteri yang lain yang bernama Tara dan berasal dari Sriwijaya). Pada masa itu Rakai Patapan pu Palar, yang telah memberikan tanahnya sebagai sima, memiliki anak yang bernama Rakai Pikatan (penguasa daerah di Pikatan) dan sangat wajar juga memiliki ambisi menjadi raja. Oleh karena itu putri mahkota kemudian dikawinkan dengan Rakai Pikatan. Setelah Samarattungga wafat atau mengundurkan diri, maka ia digantikan oleh Rakai Pikatan. Rekonstruksi ini sesuai dengan daftar nama raja-raja yang dimuat di dalam prasasti Mantyasih I tahun 829 Saka, yaitu Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nama ini telah disebut dengan sebutan '*ratu tatkala rakai pikatan*' dalam prasasti Tulang Air tahun 850 M. Oleh karena ia menganut agama Siwa (Hindu), maka ia memerintahkan membangun candi kerajaan yang berlatar belakang agama Hindu, yaitu candi Loro Jonggrang di Prambanan, seperti diketahui dari prasasti Siwagrha tahun 856 M. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ia tidak mengabaikan candi kerajaan yang dibangun oleh pendahulunya dan juga untuk menjaga perasaan permaisurinya, maka ia juga memberikan kontribusi dengan menambah bangunan candi perwara di kompleks percandian Plaosan Lor.

Di dalam panggung sejarah Mataram Kuna tokoh ini cukup kontroversial karena menunjukkan bukti-bukti sejarah yang cukup

mengagumkan. Pertama, dia lah yang memerintahkan membangun Candi Loro Jonggrang Prambanan seperti tampak dalam prasasti Siwagra (rumah Siwa) tahun 856 M. Dalam prasasti itu juga ditunjukkan adanya penyerahan kekuasaan secara langsung (*asilih tangan inangsō*) kepada penggantinya, yaitu Rakai Kayuwangi. Secara fisik bahkan prasasti ini merupakan bukti karya sastra pertama yang berbentuk puisi (kakawin).

Sepanjang masa pemerintahannya, dapat diketahui perjalanan hidup seorang raja sejak dari penobatannya sampai menjadi *cakrawartin*, karena ketika ia menyerahkan kekuasaannya kepada penggantinya, yaitu *Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala Sri Sajanotsawattungga*, dia sudah menggunakan nama *Jatiningrat*. Tokoh ini terbukti juga sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, karena dia telah mengawini Pramodawardhani, anak Samaratungga, raja yang beragama Budha. Pengabdianya juga ditunjukkan dengan berpartisipasi dalam pembangunan Candi Plaosan Lor yang berlatar belakang agama Budha. Bukti-bukti tentang kontribusi Rakai Pikatan terhadap pembangunan Candi Plaosan Lor tampak pada formula dalam prasasti-prasasti pendek di kompleks percandian itu. Di antara prasasti-prasasti pendek yang berjumlah lebih dari 30 buah itu, terdapat nama-nama antara lain : *Sang Watuhumalang Pu Tguh, Sang Sirikan Pu Surya, Rakai Gurunwangi Dyah Saladu, Rakai Gurunwangi Dyah Ranu, dan Sri Maharaja Rakai Pikatan*, yang berdekatan dengan frasa "*dharma srimaharaja*". Formula kalimat ini kurang lebih dapat diartikan sebagai "pemberian/hadiah dari Sri Maharaja Rakai Pikatan".

Pada akhir masa pemerintahannya ia menyerahkan kekuasaannya kepada anak bungsunya (*walaputra*) karena yang bersangkutan berhasil menaklukkan pemberontakan yang dipimpin oleh Rakai Walaing Pu Kumbayoni. Pergantian kekuasaan ini tidak lazim, sehingga perlu dicantumkan dalam sebuah prasasti. Pengganti raja bukan putra mahkota, mungkin sekali karena seorang putri, tetapi anak bungsunya yang

berjasa terhadap keutuhan kerajaan. Oleh karena itu anak bungsunya berhak atas waris tahta kerajaan dan kemudian dilantik menjadi raja.

Sesuai dengan urutan nama-nama raja yang tercantum dalam prasasti Mantyasih tahun 907 M, maka secara berturut-turut setelah Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhumalang dan terakhir Rakai Watukura Dyah Balitung. Berikut ini adalah daftar nama raja dan penguasa yang tercantum dalam prasasti Mantyasih tahun 907 M, dikombinasikan dengan yang tercantum dalam prasasti Wanua Tengah III tahun 908 M.

Tabel 2.2. Daftar Raja dan Penguasa yang Tercantum dalam Prasasti Mantyasih

Prasasti Mantyasih 907 M	Prasasti Wanua Tengah III 908 M
Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya	Rahyangta ri Mdang
Sri Maharaja Rakai Panangkaran	Rake Panangkaran (746-784 M)
Sri Maharaja Panunggalan	Rake Panaraban (784-803 M)
Sri Maharaja Rakai Warak	Rake Warak Dyah Manara (803-827 M)
----	Dyah Gula (827-828 M)
Sri Maharaja Rakai Garung	Rake Garung (828-847 M)
Sri Maharaja Rakai Pikatan	Rake Pikatan Dyah Saladu (857-855 M)
Sri Maharaja Rakai Kayuwangi	Rake Kayuwangi Dyah Lokapala (855 - 885 M)
----	Dyah Tagwas (855 M)
----	Rake Panumwangan Dyah Dewendra (885-887 M)
----	Rake Gurunwangi Dyah Bhadra (887 M)
Sri Maharaja Rakai Watuhumalang	Rake Wungkalhumalang Dyah Jbang (894-898 M)
Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung	Rake Watukura Dyah Balitung (898 - 908 M)

Sumber : *Olahan Studio 2003*

Selain Sri Maharaja Rakai Pikatan yang aktivitas kerajaannya banyak terjadi di wilayah Kedu atau Temanggung sekarang, adalah Rakai watukura Dyah Balitung. Raja ini juga tidak kalah kontroversinya dibandingkan dengan Rakai Pikatan. Pertama, dari asal-usulnya tidak jelas sehingga diduga dia naik tahta karena perkawinannya dengan putri raja sebelumnya. Prasasti tertua yang dikeluarkannya, yaitu prasasti Têlahap berasal dari daerah Temanggung. Untuk melegitimasi kedudukannya atas tahta kerajaan dia juga membuat daftar nama raja-raja yang memerintah sebelumnya agar dapat 'diakui' sebagai penerusnya, yaitu dalam prasasti Mantyasih tahun 907 M dan prasasti Wanua Tengah III tahun 908 M. Kedua prasasti ini juga ditemukan di daerah Temanggung, yaitu di Kecamatan Kedu dan di Kecamatan Kaloran. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung antara tahun 898 – 910 M telah ditemukan tidak kurang dari 50 buah prasasti yang ditulis di atas media batu dan perunggu serta sebagian besar ditemukan di Temanggung dan Prambanan. Mengingat banyaknya sumber prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya, maka rekonstruksi sejarah masa pemerintahan Balitung ini dapat ditulis lebih leluasa. Namun demikian karena tidak langsung berhubungan dengan Temanggung, maka dalam kesempatan ini cukup ditunjukkan hubungannya dengan isi prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Temanggung.

Sampai saat ini sekurang-kurangnya terdapat tiga buah prasasti panjang yang dikeluarkan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung yang berasal dari Temanggung, yaitu Prasasti Mantyasih tahun 907 M ditemukan tahun 1927 di Kedu, prasasti Rukam tahun 907 M ditemukan tahun 1975 di Desa Petarongan, Parakan, Temanggung, dan prasasti Wanua Tengah III tahun 908 M ditemukan tahun 1985 di Kecamatan Kaloran, Temanggung. Ketiga prasasti ini semuanya dituliskan di atas media lempengan perunggu, ada yang satu muka/sisi, tetapi ada juga yang dipahatkan bolak-balik. Ketiganya berhuruf Jawa Kuna standar dan berbahasa Jawa Kuna, kecuali dalam Prasasti Wanua Tengah III terdapat kutipan Prasasti Rakai Garung dalam bahasa Sanskerta. Kecuali berisi

tentang penetapan suatu daerah menjadi *sīma*, daerah perdikan, prasasti Rukam juga berisi informasi tentang pernah terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tertumpahnya aliran lahar di daerah ini. Prasasti Mantyasih dan Prasasti Wanua Tengah III sama-sama berisi daftar nama raja atau penguasa sebelum Balitung, tetapi nama yang dicantumkan tidak sama baik sebutannya maupun jumlahnya, padahal jarak waktu penulisannya hanya sekitar tujuh bulan. Oleh karena itu semakin memperkuat tafsiran bahwa Raja Rakai Watukura Dyah Balitung memang seorang raja yang kontroversial dan dapat dipahami karena dia 'bukan' pewaris tahta kerajaan, tetapi naik tahta karena perkawinan, sehingga perlu menunjukkan legitimasinya.

Sejarah Mataram Kuna periode Jawa Tengah pasca pemerintahan Balitung terlihat sangat kacau, sehingga dapat disebut telah terjadi instabilitas dalam pemerintahan kerajaan Mataram Kuna. Ketidakstabilan itu diawali dengan pergantian kekuasaan dari Balitung kepada Daksa (*Sri Daksottama Bahubajrapratipaksasya*), yang semula menjadi '*rowang haji*' (teman raja). Berdasarkan identifikasi terhadap prasasti yang dikeluarkan oleh Balitung maupun oleh Daksa sendiri, dapat diketahui bahwa Daksa adalah saudara ipar Balitung yang masih mendapat kesempatan naik tahta kerajaan, karena sebelumnya tahta itu dipegang oleh kakak iparnya yang telah mengawini kakak perempuannya. Setelah Daksa turun tahta digantikan oleh Rakai Layang Dyah Tulodong. Tokoh ini tidak pernah dikenal sebelumnya, kecuali hanya sebagai '*pagerwsi*' – suatu jabatan dalam birokrasi kerajaan yang sangat rendah. Setelah memerintah selama lebih kurang tiga tahun, ia kemudian digantikan oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Tokoh inipun muncul dengan tiba-tiba, tetapi dari salah satu prasastinya (prasasti Wuatantija) dia mengaku sebagai anak "*kryan landayan sang lumah ing alas*". Jika nama ini dapat disamakan dengan Rakryan Landayan, seorang tokoh yang pernah melakukan intrik pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, maka dapat diduga ambisi ayahnya dapat dipenuhi oleh anaknya yang kemudian menjadi raja.

Setelah Rakai Sumba Dyah Wawa yang menggantikan sebagai raja adalah Pu Sindok, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Rakryan Mahamantri i Halu pada masa Tulodong dan menjabat sebagai Rakryan Mahamantri i Hino pada masa pemerintahan Dyah Wawa. Berdasarkan studi tentang promosi jabatan dan suksesi dalam sejarah Jawa Kuna, maka tokoh ini merupakan bukti dari sistem pergantian itu secara normatif. Tokoh ini diketahui juga menjadi raja pertama di Jawa Timur, sehingga dapat dikatakan sebagai raja yang berhasil memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad ke-10 masehi. Meskipun terdapat beberapa hipotesis tentang sebab-sebab perpindahan pusat kerajaan ini, tetapi yang cukup masuk akal adalah karena dipicu oleh meletusnya Gunung Merapi antara tahun 925 – 928 M. Selain didukung oleh bukti-bukti geologis dan epigrafis (Prasasti Rukam), kejadian itu dapat dimengerti sebagai 'kutukan' dari Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) terhadap wilayah yang masyarakatnya sudah tidak lagi mengindahkan aturan dan norma-norma keagamaan atau pengabdian kepada Sang Khalik. Hal inilah yang menjadi anti klimaks dari kisah sejarah Mataram Kuno periode Jawa Tengah yang kemudian ibukotanya pindah ke Jawa Timur.

C. Masa Kerajaan Islam dan Kolonial Belanda

Masa awal masuknya Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa belum jelas benar. Data arkeologis tertua menunjuk pada makam Puteri Suwari di Leran Gresik dengan nisan berupa lempengan batu kapur dan berbahasa Arab yang menyatakan bahwa makam itu adalah Fatimah binti Maimun bin Hibattalah yang meninggal pada 7 Rajab 475 Hijriyah atau 1 Desember 1082. Data berikutnya jaraknya cukup jauh, yaitu Makam Malik Ibrahim di kota Gresik yang meninggal pada 12 Rabi'ulawal 822 Hijriyah atau 8 April 1419. Selain itu data tertua tentang telah adanya orang-orang Islam, yaitu terdapat di Makam Tralaya di dekat Kraton Majapahit dengan nisan tertua berangka tahun 1298 Saka atau tahun 1376 M.

Kerajaan Islam pertama di Jawa setelah runtuhnya kerajaan Majapahit adalah kerajaan Demak. Kerajaan ini berada di kota Demak di pesisir utara Pulau Jawa bagian Tengah. Raja pertamanya adalah Raden Patah yang kemudian digantikan oleh Pangeran Sabrang Lor. Setelah Pangeran Sabrang Lor wafat, maka yang menggantikannya adalah Raden Trenggono yang bergelar Sultan Demak. Sultan ini kemudian digantikan oleh Sultan Prawata yang kemudian terbunuh oleh Arya Jipang dalam perang perebutan kekuasaan. Setelah Arya Jipang dapat disingkirkan, maka tahta kemudian diambil alih oleh Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Sultan ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang di daerah pedalaman, dan memberikan tanah di Mataram dan Pati kepada Ki Gede Pemanahan dan anaknya Sutawijaya serta Ki Penjawi sebagai balas budi atas bantuannya ketika berperang melawan Arya Jipang. Pada perempat terakhir abad XVI muncul suatu kekuatan baru di Jawa Tengah yang biasa disebut dengan Mataram Islam.

Kerajaan Mataram Islam ini beribukota di Kotagedhe, dekat Yogyakarta ke arah Tenggara. Penguasa pertama wilayah ini adalah Ki Ageng Pemanahan yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senapati. Panembahan Senapati ini kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Pati, Surabaya, Jepara, dan Madiun. Setelah wafat (tahun 1522 Saka atau 1601 Masehi) ia digantikan oleh anaknya, yaitu Pangeran Jolang. Sebelum Panembahan Senapati meninggal, bangsa Belanda telah datang di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Pada masa pemerintahan Pangeran Jolang telah terjadi kontak antara Belanda dengan kerajaan ini. Setelah Pangeran Jolang meninggal ia digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1646). Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah mulai terjadi perang antara Kerajaan Mataram Islam dengan Belanda. Akan tetapi, serangan Sultan Agung terhadap Belanda beberapa

kali mengalami kegagalan. Setelah wafat Sultan Agung digantikan oleh Susuhunan Amangkurat I.

Susuhunan Amangkurat I berkuasa mulai 1646-1677. Pada awal kekuasaannya, ia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kotagedhe ke Plered. Selain itu ia juga mengadakan perjanjian dengan VOC yang isinya Belanda akan membantu raja dalam melawan musuh-musuhnya, tetapi Sunan harus membayar biayanya dan memberikan konsesi ekonomi pada VOC. Setelah Amangkurat I wafat ia digantikan oleh Pangeran Adipati Anom yang kemudian bergelar Susuhunan Amangkurat II.

Amangkurat II berkuasa mulai tahun 1677-1703. Pada masa pemerintahannya ia meminta bantuan VOC untuk merebut wilayahnya kembali. Sebagai konsekuensinya kerajaan harus membayar biaya perang ke VOC dan menyerahkan daerah sebelah timur Karang sampai Pamanukan kepada VOC. Kemudian pada hari Rabu Pon 27 Ruwah 1603 Jawa atau tahun 1680 Masehi Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan dari Plered ke Kartasura. Pada tahun 1703 Amangkurat II wafat dan ia digantikan oleh puteranya yang kemudian bergelar Susuhunan Amangkurat III.

Amangkurat III berkuasa mulai 1703-1708. Pada masa pemerintahannya, salah seorang kerabatnya yaitu Pangeran Puger melarikan diri ke Semarang dan meminta bantuan VOC untuk mengakuinya sebagai raja yang baru. Kemudian VOC mengangkatnya sebagai raja pada tahun 1704 dengan gelar Paku Buwana I. Dengan dibantu oleh pasukan VOC Paku Buwana I menyerang Amangkurat III sampai menyerah dan akhirnya wafat pada tahun 1734 setelah diasingkan di Srilangka.

Paku Buwana I berkuasa mulai tahun 1714-1719. Atas bantuan VOC yang membantunya mengalahkan Amangkurat III, maka ia menyerahkan daerah Priangan, Cirebon, dan Madura Timur kepada VOC

serta harus mengakui hak monopoli atas impor candu dan tekstil, dan harus menerima penempatan satu Garnisun pasukan VOC di Kraton. Setelah wafat ia digantikan puteranya yang bergelar Susuhunan Amangkurat IV.

Amangkurat IV berkuasa mulai tahun 1719-1726. Pada masa pemerintahannya keadaan kerajaan keruh karena banyak konflik intern, pemberontakan-pemberontakan, dan penggerogotan wilayah oleh VOC. Pada tahun 1726 Amangkurat IV wafat dan digantikan oleh puteranya yang bergelar Paku Buwana II. Ia berkuasa mulai tahun 1726-1749. Pada masa kekuasaannya terjadi beberapa pemberontakan, salah satunya adalah *Geger Pacina* pada tahun 1740-an yang memaksa Sunan keluar dari kraton. Pada tahun 1742 Sunan kembali ke kraton dan memutuskan untuk memindahkannya. Pada tahun 1746 Paku Buwana II memindahkan kratonnya dari Kartasura ke Surakarta dan tak lama kemudian ia wafat. Setelah itu ia digantikan oleh anaknya yang bergelar Susuhunan Paku Buwana III yang berkuasa mulai tahun 1749-1768. Pada tahun 1755 Paku Buwana III menandatangani Perjanjian Giyanti. Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Selanjutnya kerajaan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta berkembang dengan pesat. Raja pertamanya bergelar Sultan Hamengku Buwana I yang berkuasa pada tahun 1755 -1792. Setelah itu ia digantikan anaknya yang bergelar Sultan Hamengku Buwana II yang berkuasa mulai tahun 1792-1828. Pada masa pemerintahan Hamengku Buwana II terjadi pemberontakan, sehingga kerajaan terpecah dua menjadi kerajaan Mataram Islam dengan Sultan Hamengku Buwana II sebagai raja dan Kadipaten Paku Alaman dengan dipimpin oleh Paku Alam I pada tahun 1813. Sultan Hamengku Buwana II mengalami pasang surut dan naik turun tahta sesuai dengan kondisi politik pemerintahan waktu itu. Setelah wafat Sultan Hamengku Buwana II digantikan oleh puteranya yang bergelar Sultan Hamengku Buwana III. Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta merupakan kerajaan Islam terakhir di Jawa sebelum ditundukkan oleh Belanda.

Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613-1645 M. Pada waktu itu wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat yang dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut : Istana atau Keraton merupakan pusat negara dan terletak di Ibu Kota negara disebut wilayah Kutanegara atau Kutagara. Selanjutnya wilayah yang mengitari Kutagara disebut wilayah Negara Agung. Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk wilayah pantai disebut wilayah Mancanegara. Mengingat wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur maka dibagi menjadi dua bagian yaitu Mancanegara Wetan dan Mancanegara Kilen. Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah Pesisiran. Sebagaimana halnya wilayah Mancanegara, wilayah Pesisiran juga dibagi menjadi dua bagian yaitu Pesisiran Kilen dan Pesisiran Wetan yang batasnya adalah Sungai Tedunan atau Sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara. Dalam hal ini Wilayah Kedu termasuk ke dalam wilayah Mancanegara Kilen yang dipimpin oleh seorang tumenggung/adipati/bupati. Para tumenggung/adipati/bupati pada masa Mataram Islam merupakan penguasa yang berdiri sendiri atas daerahnya. Kekuasaan raja Mataram Islam hanyalah bayangan, karena kewajiban mereka terhadap raja Mataram hanyalah membayar upeti dan menghadap raja pada bulan-bulan yang telah ditentukan.

Sistem pembagian wilayah Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami perubahan dengan adanya pengaruh VOC. Sepeninggal raja Sultan Agung, berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan semakin menyempit akibat aneksasi yang dilakukan oleh VOC, sebagai imbalan atas bantuannya dalam pertentangan-pertentangan di dalam kerajaan Mataram Islam sendiri. Mula-mula daerah Kerawang, Priangan, dan Semarang, kemudian Cirebon, dan separoh Pulau Madura. Selanjutnya setelah Perang Cina berakhir pada tahun 1743 seluruh daerah Pantai Utara Jawa dan seluruh Pulau Madura sudah dikuasai oleh Belanda. Wilayah Kerajaan Mataram Islam makin menyempit dengan diadakannya

perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M yang mengakibatkan kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua bagian yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pada pembagian ini wilayah Temanggung menjadi bagian dari wilayah Mancanegara kerajaan Yogyakarta.

Pada tahun 1800 VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan segala kewenangannya serta kekuasaannya diambil alih oleh perintah kolonial Belanda. Pada tahun 1801 Hindia Belanda dipimpin oleh Letnan Gubernur Daendels yang memerintahkan pembangunan jalan di Pesisir Utara Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan.

Sementara itu perubahan kekuasaan pada kerajaan-kerajaan di Jawa untuk pertama kali terjadi pada masa Gubernur Daendels (1808-1811), yaitu dengan adanya peraturan baru mengenai upacara penerimaan Residen di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Menurut peraturan baru ini residen di kerajaan itu harus diberi penghormatan sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja. Dengan adanya peraturan ini, maka raja Surakarta maupun Yogyakarta diturunkan martabatnya, yaitu dari raja merdeka menjadi raja bawahan.

Peraturan yang dibuat oleh Daendels tersebut dapat diterima di kerajaan Surakarta namun tidak diterima di Yogyakarta. Akibatnya Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh yang menentang peraturan ini pada tahun 1810 M dipaksa turun tahta dan diganti oleh putra mahkota yang bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Daendels untuk memaksa Kraton Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 dengan menyerahkan sebagian wilayahnya.

Pada tahun 1811-1816 Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris dibawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles, Kraton Surakarta dan Yogyakarta berharap kekuasaannya pulih kembali. Namun kenyataannya wilayah kedua kerajaan tersebut malah semakin berkurang. Di Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono II naik tahta lagi dan berhasil menggerakkan

Raja Surakarta untuk bersama-sama menentang pemerintah Inggris. Oleh karena itu pemerintah Inggris mengambil tindakan kekerasan dan memaksa Sultan Sepuh turun tahta lagi. Peristiwa ini mengakibatkan adanya penandatanganan perjanjian baru pada tanggal 1 Agustus 1812 yang berisi antara lain wilayah Kedu (Kebumen, Purworejo, Magelang, Wonosobo, termasuk Temanggung) diserahkan kepada Inggris.

Pada masa kekuasaan Inggris inilah diperkenalkan sistem sewa tanah yang menghapuskan kerja rodi.. Sistem sewa tanah ini membebaskan rakyat untuk menanam tanaman apa saja. Akan tetapi pelaksanaannya tidak lama karena pada tahun 1816 Inggris mengembalikan Pulau Jawa ke Pemerintah Kolonial Belanda.

Semua keputusan pemerintah Inggris diperbaharui oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang menimbulkan kekecewaan di pihak Kraton Yogyakarta dan Surakarta yang kemudian menimbulkan benih permusuhan menentang pemerintahan Belanda. Akibatnya di Kraton Yogyakarta meletus pemberontakan yang terkenal dengan Perang Diponegoro dari tahun 1825-1830 M. Perang ini disebut juga perang Jawa yang mengakibatkan porak porandanya perekonomian pemerintah Belanda.

Ketika perang ini berakhir, wilayah kekuasaan Kraton Surakarta dan Yogyakarta menjadi semakin sempit karena harus kehilangan kekuasaannya atas daerah Mancanegara. Dengan demikian sejak tahun 1830 wilayah Kraton Surakarta hanya meliputi daerah Pajang dan Sukowati, sedangkan Raja Yogyakarta menguasai daerah Mataram dan Gunung Kidul.

Semenjak wilayah Kedu yang meliputi daerah Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kebumen lepas dari wilayah kekuasaan Kraton Yogyakarta pada tahun 1812, maka wilayah tersebut langsung di bawah pengawasan pemerintahan Gubernur Raffles. Masa pemerintahan gubernur Inggris atas Pulau Jawa yang hanya berlangsung selama tahun 1811-1816 sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada

pemerintah Belanda, membagi Jawa atas daerah-daerah administratif-*perfectuur* yang merupakan warisan Daendels dan mengubah namanya menjadi karesidenan. Daerah-daerah administratif karesidenan dikepalai oleh para residen. Diadakannya kekuasaan residen sebenarnya bertujuan untuk menghapus lembaga bupati yang semi feodal dan tidak liberal. Raffles ingin menghapus jabatan bupati yang turun temurun pada masa kerajaan Mataram Islam dan menghendaki dihapuskannya hak *apanage* dan *pancen* kemudian menggantinya dengan memberikan gaji tetap kepada para bupati.

D. Perkembangan Temanggung Sekitar Abad 19 M

Temanggung sejak masa klasik, Islam, dan Kolonial Belanda serta Inggris awal abad ke-19 dengan melihat bukti-bukti sejarah di atas merupakan pusat aktivitas. Hanya pada periode tertentu karena ketiadaan bukti sumber sejarah aktivitas itu kelihatan samar-samar.

Menurut kisah perjalanan yang ditulis pada abad XIX M baik oleh bangsa Eropa maupun oleh orang-orang pribumi, terdapat kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa dan di pedalaman. Sampai dengan akhir abad XIX M kota-kota tersebut tidak mengalami perkembangan yang berarti. Kota-kota yang tidak mempunyai fungsi perdagangan pada umumnya hanya merupakan pusat kedudukan pemerintah daerah. Tipe kota kabupaten digambarkan tidak banyak berbeda dengan lingkungan pedesaan sekitarnya, hanya '*dalem*' bupati dan sekitarnya yang menonjol. Bentuk bangunan rumah kebanyakan masih tradisional, hanya lambat laun bangunan gedung, loji, atau villa muncul kemudian.

Bersamaan dengan perluasan sistem pemerintahan kolonial lengkap dengan birokrasinya dan perkembangan jumlah penduduk Eropa, wajah kota-kota mulai berubah. Pusat kota terutama terdiri atas gedung-gedung pemerintahan dan kediaman pejabat. Kabupaten menghadap alun-alun dan di sekitarnya terdapat rumah asisten residen atau kontrolir,

gedung pengadilan, rumah penjara, gudang garam, kantor pos, dan telpon serta rumah pejabat baik Eropa maupun pribumi. Pusat kegiatan perekonomian berkisar di sekitar pasar yang di dekatnya terdapat pertokoan yang terkenal dengan sebutan Pecinan sekaligus menjadi tempat pemukiman orang Cina.

Lokasi pusat lalu lintas baru muncul setelah dibangunnya jalan kereta api sejak tahun 1870, yaitu stasiun kereta api, gudang-gudang, warung-warung, dan rumah-rumah penginapan. Pemasangan jaringan kereta api antara lain bertujuan untuk melancarkan angkutan hasil perkebunan ke daerah-daerah pelabuhan.

Sebagai daerah yang berhawa sejuk, Kabupaten Temanggung merupakan daerah penghasil perkebunan. Daerah ini kemudian menjadi incaran hunian bagi orang-orang Eropa yang semula terletak di hilir sungai seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Kota-kota tersebut dianggap kurang sehat karena dibangun di atas rawa-rawa. Orang-orang Eropa kemudian memindahkan tempat tinggalnya ke pemukiman baru di daerah pedalaman Jawa, yang dianggap lebih baik dan sehat. Dengan banyaknya penghuni orang Eropa kemudian muncul bangunan-bangunan fasilitas lainnya yang melengkapi hunian orang-orang kota, seperti rumah sakit, gedung-gedung sekolah dan bangunan gereja. Berdasarkan Resolusi Nomor 4 tanggal 10 Nopember 1834 terbentuklah kabupaten Temanggung yang secara resmi sampai sekarang menjadi 'Hari Jadi Kabupaten Temanggung'. Sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Raden Tumenggung Ario Djojo Negoro yang menjabat dari 10 Nopember 1834 sampai dengan 1848. Selanjutnya diganti oleh Raden Adipati Ario Holand Soemodilogo dari tahun 1848 sampai dengan 1878. Pada masa ini pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan tentang Pemerintah Daerah yang disebut dengan *Reglement of het Beleit der Regering van Nedelandsch Indie* (Stbl. 1855/2), yang isinya tidak mengenai *desentralisasi* melainkan *sentralisasi*.

Selain sentralisasi dijalankan pula dekonsentrasi, sehingga pada waktu itu telah dikenal pula wilayah-wilayah administratif, misalnya secara hirarkis adalah *Gewest (Residentie), Afdeeling, District, dan Onder-district*. Sistem ini tidak dapat terus dipertahankan tetapi menyesuaikan dengan perkembangan politik dan pemerintahan di Hindia Belanda maupun Negeri Belanda.

Pada masa pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Holland Soemadirdjo (1878-1882) yang kemudian diganti Raden Tumenggung Tjokroatmodjo (1882-1906) pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur In Nederlandsch Indie* atau yang lebih dikenal dengan *Decentralisatiewet 1903*. Status ini memberikan kemungkinan bagi pembentukan *Gewest* atau bagian *gewest* yang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai segala kegiatannya. Pengurusan keuangan tersebut dilakukan oleh sebuah *raad* yang dibentuk bagi masing-masing daerah. Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan dengan *Decentralisatie Besluit* dan *Locale Radenordonantie*. Menurut kedua peraturan ini, daerah yang diberi keuangan sendiri ini disebut *Locaal Ressor*, sedangkan *Raad*-nya disebut *Locale Raad*. *Locale Raad* dibedakan lagi menjadi *Geweste Tijke raad* bagi *Gewest* dan *Plaatselijke Raad* bagi daerah-daerah yang merupakan bagian dan *Gewest*.

Pertumbuhan daerah otonom sejak 1903 di atas terjadi di wilayah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di wilayah yang langsung dikuasainya ini, terdapat juga apa yang disebut dengan *Inlandsche Gemeente* seperti Desa, Hutan, Kurja, dan Marga. Untuk Jawa dan Madura, *Inlandsche Gemeente* diatur dengan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)*, sedangkan untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura diatur dengan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB)* dan *Desa Ordonnantie*. Karena pecah Perang Dunia II, *Desa Ordonnantie* belum dilaksanakan, karena di daerah yang tidak langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda terdapat Daerah Otonom yang disebut *Zelfbes turende landschappen* terdiri atas kerajaan-

kerajaan asli Indonesia yang mempunyai ikatan dengan Pemerintah Hindia Belanda melalui kontrak-kontrak politik, baik kontrak politik jangka panjang (*lange contracten*) seperti Kasunanan Surakarta, Kesultananan Yogyakarta, dan Deli, maupun kontrak politik pendek (*korte verkiaring*) seperti, Pakualaman, Mangkunegaran, Kesultanan Goa, dan Bone.

Pada waktu Bupati Raden Mas Adipati Ario Tjokroadikoesoemo memerintah di Temanggung, dikeluarkanlah *Wet Op de Bestuurshervorming* oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada intinya undang-undang ini adalah 'pembentukan badan-badan pemerintahan baru dengan mengikut sertakan orang-orang pribumi, yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembebanan tanggung jawab. Sebagai akibat adanya hak itu dengan tujuan agar memperoleh pengalaman politik untuk dapat memberikan kepada pemerintah Hindia Belanda suatu pemerintahan nyata dan bebas di lingkungan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa jabatan Bupati Raden Adipati Ario Tjokrosoetomo (1923-1943) muncul Peraturan Pelaksanaan Undang-undang yang disebut *Province Ordonnantie, Regentschap Ordonnantie dan Stadsgemeente Ordonnantie*. Berdasar peraturan tersebut dibentuk berbagai propinsi *regentschap* dan *stadsgemeente* yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di Jawa dan Madura. Konsekuensinya *Locaal Ressort* yang ada dihapuskan. Di luar Jawa dan Madura keadaannya berbeda, yaitu *Locaal Ressort* yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Desentralisasi 1903 masih tetap dipertahankan.



E. Masa Sejarah Pergerakan Nasional

1. Masa Kebangkitan Nasional

a. Awal Pergerakan Nasional

Revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 membawa nafas baru bagi banyak negeri terjajah di Asia termasuk Indonesia. Walaupun pengaruhnya pada waktu itu belum menguntungkan rakyat, namun sedikitnya telah menimbulkan pandangan dan gagasan lain pada suatu golongan baru dalam masyarakat yang nantinya akan mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang pembebasan diri dari belenggu penjajahan. Golongan baru ini yang menjadi elite nasional dan menyadari bahwa perjuangan masing-masing daerah secara sendiri-sendiri tidak akan berhasil.

Gejala sejarah yang terjadi itu dikenal sebagai kebangkitan Nasional yang tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri. Faktor dalam negeri adalah pelaksanaan politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang memungkinkan masuknya ide-ide dari Barat, maupun pengaruh pembaruan-pembaruan di dalam agama Islam. Faktor luar negeri antara lain adalah masuknya gagasan nasionalisme modern, khususnya pengaruh pergerakan nasional dan modernisasi di beberapa negara Asia seperti di Turki, Cina, dan India, serta restorasi Meiji di Jepang dan kemenangan negeri itu atas Rusia pada tahun pertama abad ke-20, suatu kemenangan yang dianggap sebagai kemenangan orang Asia (kulit berwarna) terhadap orang Eropa (kulit putih).

Pengaruh gagasan-gagasan modern, anggota elite nasional menyadari bahwa perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan mempergunakan organisasi modern. Baik pendidikan, perjuangan politik, perjuangan ekonomi, maupun perjuangan sosial budaya, memerlukan organisasi.

Berdasarkan pandangan yang demikian, beberapa pemimpin di dalam masyarakat mulai menggerakkan pemuda-pemuda, khususnya kaum terpelajar, untuk mengorganisasi diri, baik pada bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dipandang dari latar belakang masyarakat pribumi yang masih bersifat tradisional, maka apa yang dilakukan oleh sekelompok siswa Stovia di Kwitang di antaranya dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo merupakan langkah inovatif yang besar sekali, yaitu pembentukan suatu organisasi modern pertama di kalangan bangsa Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 di gedung perguruan mereka yang diberi nama Budi Utomo dengan ketua terpilih Sutomo. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia.

Tujuan organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia dengan tidak bergerak dalam bidang politik melainkan hanya dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Beberapa cabang Budi Utomo terdapat di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Pada tahun 1911 di Solo muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi seiring dengan turunnya pengaruh Budi Utomo. Sarekat Islam ini tidak terbatas pada satu orientasi tujuan, tetapi mencakup pelbagai bidang aktivitas, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Di samping itu agama Islam merupakan ideologi, sehingga semangat religius tidak hanya menjiwai gerakan itu, tetapi juga memobilisasi pengikut yang banyak. Berpuluh-puluh cabang terdiri di seluruh Indonesia, sehingga pertumbuhan yang cepat itu membawa akibat bahwa sebagian besar pengikut gerakan itu belum mempunyai pengertian dan kesadaran sepenuhnya tentang tujuan dan kegiatannya. Selanjutnya timbullah penyimpangan-penyimpangan serta penyalahgunaan perjuangan dengan nama Sarekat Islam.

Bersamaan dengan munculnya Sarekat Islam, muncul pula Indische Partij (IP). Organisasi ini bercita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli, maupun golongan Indo,

Berdasarkan pandangan yang demikian, beberapa pemimpin di dalam masyarakat mulai menggerakkan pemuda-pemuda, khususnya kaum terpelajar, untuk mengorganisasi diri, baik pada bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dipandang dari latar belakang masyarakat pribumi yang masih bersifat tradisional, maka apa yang dilakukan oleh sekelompok siswa Stovia di Kwitang di antaranya dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo merupakan langkah inovatif yang besar sekali, yaitu pembentukan suatu organisasi modern pertama di kalangan bangsa Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 di gedung perguruan mereka yang diberi nama Budi Utomo dengan ketua terpilih Sutomo. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia.

Tujuan organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia dengan tidak bergerak dalam bidang politik melainkan hanya dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Beberapa cabang Budi Utomo terdapat di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Pada tahun 1911 di Solo muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi seiring dengan turunnya pengaruh Budi Utomo. Sarekat Islam ini tidak terbatas pada satu orientasi tujuan, tetapi mencakup pelbagai bidang aktivitas, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Di samping itu agama Islam merupakan ideologi, sehingga semangat religius tidak hanya menjiwai gerakan itu, tetapi juga memobilisasi pengikut yang banyak. Berpuluh-puluh cabang terdiri di seluruh Indonesia, sehingga pertumbuhan yang cepat itu membawa akibat bahwa sebagian besar pengikut gerakan itu belum mempunyai pengertian dan kesadaran sepenuhnya tentang tujuan dan kegiatannya. Selanjutnya timbullah penyimpangan-penyimpangan serta penyalahgunaan perjuangan dengan nama Sarekat Islam.

Bersamaan dengan munculnya Sarekat Islam, muncul pula Indische Partij (IP). Organisasi ini bercita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli, maupun golongan Indo,

Cina, dan Arab. Pendirinya adalah Douwes Dekker atau kemudian berganti nama menjadi Danudirdja Setyabuddhi bersama-sama dengan dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Abdul Muis pada tahun 1912. Organisasi ini merupakan organisasi partai politik yang pertama di Indonesia. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih dari 7.000 orang, kebanyakan orang Indo. Programnya sangat tegas dan jelas, yaitu sebagai partai politik dan bercita-cita mencapai Hindia Merdeka.

b. Perkembangan Pergerakan Nasional

Pada awal Pergerakan Nasional terlihat adanya tiga organisasi yang menonjol dengan sifat yang berbeda. Budi Utomo lebih bersifat organisasi budaya, Sarekat Islam bersifat sosial-ekonomis dan religius, sedangkan Indische Partij bersifat politis. Tetapi, ketiga-tiganya, meskipun dengan taraf yang berbeda-beda, berjiwa nasionalis. Pada masa selanjutnya muncul organisasi yang berjiwa lain, yakni internasionalistis dengan ideologi sosialis dan komunis. Di samping itu muncul pula organisasi-organisasi kedaerahan serta organisasi-organisasi khusus lainnya, misalnya organisasi pemuda dan wanita maupun organisasi yang bersifat keagamaan. Di antaranya adalah Central Sarekat Islam (CSI) yang didirikan tahun 1915 di Surabaya, tugasnya adalah membantu SI daerah ke arah kemajuan dan mengatur kerjasama antar SI daerah.

Ada sebagian kecil dari pimpinan SI (Semaun dkk.) menolak SI ikut serta dalam Volksraad, karena menilai bahwa badan itu hanya suatu alat kaum kapitalis untuk mengelabui rakyat. Hal ini menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Sociaal – Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada tahun 1914, pemimpinnya seorang belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet.

c. Gerakan Islam

Masyarakat Islam di Indonesia pada peralihan abad ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu "kaum tua" dan "kaum muda". Golongan pertama terdiri dari mereka yang tetap berpegang kepada hal-hal yang tradisional, sedangkan golongan kedua menghendaki adanya pembaharuan.

Perbedaan ini pada umumnya bersifat perbedaan dalam bidang agama. Tetapi sesudah tahun 1920-an perbedaan itu meluas ke bidang politik. Banyak di antara anggota Sarekat Islam, meninggalkan partainya dan beralih kepada komunisme. Bahkan beberapa pemimpin Sarekat Islam mempunyai hubungan langsung dengan Komintern (Gerakan Komunis Internasional), sedangkan beberapa pemimpin lembaga pendidikan Islam, di antaranya di Minangkabau, terpengaruh oleh ideologi komunis.

Partai Politik selama beberapa waktu telah terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh Sarekat Islam. Di sisi lain dalam pengajaran agama Islam di Indonesia telah dicampuri oleh bermacam-macam ajaran yang berasal dari luar agama Islam. Hal tersebut menimbulkan suatu gerakan untuk pembaharuan (penjernihan) ajaran Islam, yang dicapai melalui gerakan, baik di bidang pendidikan dan sosial, maupun di bidang politik, yang keduanya adalah pengaruh yang berasal dari luar Indonesia. Gerakan yang pertama berwujud gerakan seperti perserikatan ulama, Muhammadiyah, persatuan Islam dan sekolah-sekolah agama di Minangkabau. Gerakan yang kedua terlihat dari kegiatan partai-partai yang mendasarkan dirinya pada cita-cita Islam, seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), Partai Islam Indonesia yang menyalurkan keinginan serta cita-cita dari anggota-anggota Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan organisasi lainnya, yang karena suatu hal tidak dapat menyalurkan aspirasi politik mereka melalui Sarekat Islam atau penerusnya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

2. Masa Radikal

a. Pergerakan Non-kooperasi

Setelah perang Dunia I berakhir, perasaan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme pada bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika semakin menonjol, lebih-lebih setelah adanya seruan Presiden Amerika Serikat tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa. Partai-partai politik di Indonesia dan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga terpengaruh oleh situasi demikian. Kematangan dalam perjuangan dan sikap keras yang diambil pemerintah kolonial menyebabkan sikap moderat makin ditinggalkan dan sikap radikal makin menonjol. Sikap radikal ini ditandai oleh taktik non-kooperasi dari pihak partai-partai politik. Artinya dalam memperjuangkan cita-citanya mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, terutama di bidang politik. Semua hal yang diperlukan untuk mencapai cita-cita itu akan diusahakan sendiri, antara lain dengan memperkokoh persatuan nasional, memajukan pendidikan, meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Mereka juga tidak mau memasuki dewan-dewan perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial baik di pusat maupun daerah.

Taktik non-kooperasi pada masa radikal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi: Sarekat Islam (SI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

b. Gerakan Pemuda dan Gerakan Wanita

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 pada mulanya dapat dipandang sebagai organisasi pemuda. Hanya sesudah Kongres I, peranan pemuda dalam organisasi ini menjadi lemah, bahkan kemudian hilang karena merasa kecewa atas kebijakan yang diambil pemimpinnya. Beberapa tahun sesudah Budi Utomo didirikan, pada tahun 1915 berdiri Tri Koro Dharmo di Jakarta, merupakan perkumpulan untuk anak-anak sekolah menengah yang berasal dari

daerah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1918 berubah nama menjadi *Jong Java*. Pada awalnya *Jong Java* bergerak dalam bidang sosial-budaya, seperti pemberantasan buta huruf, kepramukaan, seni, dan lain-lain. Namun akhirnya bergerak juga dalam bidang politik. Sejalan dengan munculnya *Jong Java*, pemuda-pemuda daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi pemuda seperti *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Pasundan*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, *Jong Batak*, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, *Timorees Verbond*, dan lain-lain. Pada dasarnya organisasi itu semua masih bersifat kedaerahan tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing. Di luar negeri, para pemuda yang menuntut ilmu, membentuk Perhimpunan Indonesia. Para pelajar di Jakarta dan Bandung mendirikan organisasi Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) di Jakarta, dengan tujuan memperjuangkan Indonesia Merdeka. Dan pada akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 tercapai kesepakatan antar berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia II yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sebagai kelanjutan kongres pada tanggal 24 – 28 Desember 1929 di Yogyakarta disetujui gagasan fusi/penggabungan organisasi-organisasi pemuda yang telah ada. Pada tanggal 31 Desember 1930 berdirilah Indonesia Muda dengan 25 cabang, 4 di Sumatera dan 1 di Sulawesi. Karena alasan tertentu *Jong Islamieten Bond* dan Pemuda Muslimin tidak ikut dalam Indonesia Muda.

Di samping organisasi yang bersifat 'sekuler' juga ada organisasi yang bersifat keagamaan seperti, Anshor Nahdatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, JIB, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katholik, dan lain-lain. Begitupun organisasi yang terbatas lingkungannya masih banyak juga seperti Pemuda Taman Siswa, ***Unitas Studiosorum Indonesiensis*** (USI) dan lain-lain. Bahkan organisasi pemuda yang tumbuh pada masa-masa terakhir penjajahan Belanda yang bersifat kedaerahan juga masih ada seperti: pemuda-

pemudi Cirebon, Pemuda Sriwijaya, Minangkabau Muda dan sebagainya.

Sejalan dengan gerakan pemuda, ada juga gerakan kaum wanita semenjak dirintis oleh R.A. Kartini semakin berkembang dengan tujuan untuk meninggikan derajat wanita, emansipasi wanita dan hal-hal yang bertalian dengan kesejahteraan rumah tangga yang menjadi tiang suksesnya pembangunan suatu bangsa. Pada umumnya bergerak di bidang sosial-budaya, seperti Perkumpulan Kartinifonds di Semarang, Putri Mardika di Jakarta, Maju Kemuliaan di Bandung, Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukittinggi, Ina Tuini di Ambon, *Gorontalo'sche Mohammedaansche Vrouwenvereniging*, dan sebagainya.

3. Masa Moderat

a. Pergerakan Ko-operasi

Tindakan keras pemerintah kolonial terhadap PNI pada akhir tahun 1929 dengan menangkapi pemimpin-pemimpinnya yang dicurigai akan melakukan suatu pemberontakan, merupakan pertanda bahwa masa radikal bagi Pergerakan Nasional mendekati akhirnya. Untuk itu beberapa partai mengubah taktik perjuangan dengan kooperasi seperti Partai Indonesia Raya (Parindra) dengan memiliki wakil-wakil di volksrad. Di samping itu juga ada Gerakan Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial melakukan taktik kooperasi dengan pemerintah.

b. Perjuangan Nasional di *Volksrad*

Pemimpin-pemimpin PNI ditangkap pada akhir tahun 1929 dan dibentuknya *Nederlandse Club* yang sangat reaksioner pada bulan Oktober 1929 mendorong munculnya suatu fraksi baru di dalam volksrad dengan nama Fraksi Nasional. Tujuan fraksi adalah menjamin

adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di samping itu di dalam volksrad ada seorang anggota yang mengusulkan tentang perlunya mengeratkan hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia sehubungan dengan masa depan Indonesia yang lebih dikenal dengan Petisi Sutardjo. Namun tuntutan volksrad tersebut ditolak tanpa melalui sidang parlemen, sehingga mengecewakan pihak Pergerakan Nasional. Hal tersebut berarti menandakan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka oleh pemerintah Belanda dengan wakil-wakil rakyatnya, sehingga keberadaan *volksrad* di dalam memperjuangkan kemerdekaan, tidak begitu berarti. Kekecewaan karena penolakan tersebut mendorong terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Kegagalan petisi dan pembentukan GAPI memperlihatkan bahwa persatuan yang dibutuhkan belum tergalang, di samping juga belum merupakan suatu pemusatan dari segala tenaga dalam Pergerakan Nasional. Hingga akhirnya kedatangan Jepang meruntuhkan pertahanan Belanda.

4. Masa Pendudukan Jepang

Pada waktu bala tentara Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, pemerintahan pada bekas wilayah jajahan ini dibagi dalam tiga komando yaitu :

- a. Sumatra di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XXV yang berkedudukan di Bukittinggi.
- b. Daerah lainnya berada di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XVI yang berkedudukan di Jakarta.
- c. Daerah lainnya berada di bawah Komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang).

Dengan demikian pemerintahan berada di bawah kekuasaan militer yang dilaksanakan oleh Komando Angkatan masing-masing yang

disebut *Gunseikan*. Pada tanggal 11 September 1943, kekuasaan berada di bawah satu garis kekuasaan yaitu Sai Kosikikan yang juga berkedudukan sebagai Gubernur Jenderal.

Kondisi seperti ini berlangsung hingga masa jabatan bupati yang dijabat oleh R. Tumenggung Singgih Hadiporeo berakhir dan dilanjutkan oleh Tumenggung Maktal Dipodirdjo.

5. Masa Tahun 1948-1949

Masa tahun 1948-1949 adalah masa ingin kembalinya Belanda dengan membonceng tentara Sekutu ke wilayah Indonesia, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara rakyat dan TRI melawan Belanda. Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung. Rakyat Temanggung banyak yang menjadi korban atas keganasan tentara Belanda. Gedung Kabupaten Temanggung waktu itu dibumihangus dengan cara dibakar. Mereka yang tidak mengungsi atau tertangkap sebelum mengungsi dibawa ke Sungai Progo dan dibunuh dengan cara dipenggal di atas jembatan sungai itu. Jenazahnya dibuang bersama aliran sungai itu. Peristiwa ini dikenal oleh rakyat Temanggung dengan "Progo Banjir Darah". Untuk memperingati peristiwa ini di tepi timur jembatan Sungai Progo sebelah selatan jalan raya dibuat patung "Monumen Peringatan Korban Keganasan Tentara Belanda Tahun 1948-1949".

F. Masa Pembangunan Temanggung

Masa pembangunan di Indonesia pada umumnya dari Kabupaten Temanggung pada khususnya secara *de facto* ditandai dengan dimulainya kekuasaan pemerintahan orde baru. Di bidang pemerintahan daerah secara *de jure* ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menggantikan kedudukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian menyusul dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

disebut *Gunseikan*. Pada tanggal 11 September 1943, kekuasaan berada di bawah satu garis kekuasaan yaitu Sai Kosikikan yang juga berkedudukan sebagai Gubernur Jenderal.

Kondisi seperti ini berlangsung hingga masa jabatan bupati yang dijabat oleh R. Tumenggung Singgih Hadiporeo berakhir dan dilanjutkan oleh Tumenggung Maktal Dipodirdjo.

5. Masa Tahun 1948-1949

Masa tahun 1948-1949 adalah masa ingin kembalinya Belanda dengan membonceng tentara Sekutu ke wilayah Indonesia, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara rakyat dan TRI melawan Belanda. Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung. Rakyat Temanggung banyak yang menjadi korban atas keganasan tentara Belanda. Gedung Kabupaten Temanggung waktu itu dibumihangus dengan cara dibakar. Mereka yang tidak mengungsi atau tertangkap sebelum mengungsi dibawa ke Sungai Progo dan dibunuh dengan cara dipenggal di atas jembatan sungai itu. Jenazahnya dibuang bersama aliran sungai itu. Peristiwa ini dikenal oleh rakyat Temanggung dengan "Progo Banjir Darah". Untuk memperingati peristiwa ini di tepi timur jembatan Sungai Progo sebelah selatan jalan raya dibuat patung "Monumen Peringatan Korban Keganasan Tentara Belanda Tahun 1948-1949".

F. Masa Pembangunan Temanggung

Masa pembangunan di Indonesia pada umumnya dari Kabupaten Temanggung pada khususnya secara *de facto* ditandai dengan dimulainya kekuasaan pemerintahan orde baru. Di bidang pemerintahan daerah secara *de jure* ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menggantikan kedudukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian menyusul dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pembagian urusan secara terperinci terletak di tangan Pemerintah Daerah serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan urusan selebihnya berada pada pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan ini Kabupaten Temanggung memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur jalannya tugas pemerintahan daerah di bawah pengawasan pemerintah pusat. Meskipun demikian masih terdapat sejumlah hambatan di dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya :

- a. Kewenangan pejabat;
- b. Koordinasi lintas sektoral;
- c. Pendanaan

Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan pada masa ini hampir tidak dapat dilihat secara nyata adanya hasil-hasil pembangunan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun demikian masa-masa pemerintahan orde baru ini juga memiliki kelebihan, di antaranya adalah tertibnya administrasi pembangunan terutama tahapan-tahapan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Sepanjang lebih dari 30 tahun pembangunan telah dirancang dalam tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mekanisme pembangunan juga didukung oleh Anggaran Pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga cakupannya dapat melebar sampai ke pelosok pedesaan. Kondisi ini hanya bertahan sampai awal tahun 1998 setelah rejim orde baru digantikan oleh rejim berikutnya.

Setelah terjadi transisi dalam system pemerintahan, bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem pembangunan dirancang melalui sebuah dokumen yang lazim dikenal dengan nama Perencanaan Strategis (Renstra). Sampai dengan saat ini., Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menyiapkan konsep Perencanaan Strategis

Kabupaten Temanggung tahun 2002 – 2006. Beberapa hal penting dalam konsep itu yang pantas dicatat sebagai pendorong motivasi pembangunan di wilayah ini adalah mengenai VISI, MISI, dan paradigma pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk jangka waktu lima tahun periode 2002-2006 Visi pembangunan Kabupaten Temanggung adalah :

***“MENUJU TEMANGGUNG YANG LEBIH SEJAHTERA, SEJUK,
DINAMIS, DAN AGAMAS”.***

Visi ini didukung oleh empat misi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- a. Mempertahankan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya rasa aman, tertib, damai tenteram yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menghormati serta saling menghargai.
- b. Meningkatkan dan memberdayakan perekonomian rakyat, yang bertumpu pada pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang dilandasi oleh semangat pengamalan nilai-nilai, ajaran serta norma-norma keagamaan.
- d. Mengembangkan Kapasitas dan Kelembagaan Aparatur Pemerintah dalam rangka Memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas maka diharapkan proses dan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Temanggung benar-benar dapat sesuai dengan irama pembangunan dewasa ini yang akuntabel, transparan, dan demokratis. Dengan demikian setiap aktivitas pembangunan dapat mengacu sekaligus menjamin tercapainya cita-cita yang terkandung dalam Visi dan Misi ini.

BAB III

BEBERAPA ALTERNATIF PENENTUAN HARIJADI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. KRITERIA HARI JADI

Penentuan Harijadi suatu wilayah atau daerah tidak semudah menentukan kelahiran *jabang bayi*. Penelusuran dan rekonstruksi historis sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa momentum yang patut diperhitungkan agar dapat lebih arif dalam menentukan momentum mana yang layak dianggap sebagai Hari jadi wilayah atau daerah Temanggung.

Seperti diketahui ada kenyataan yang menunjukkan bahwa penentuan Harijadi di setiap daerah memiliki kriteria yang berbeda. Sebagai ilustrasi dapat disebut umpamanya Hari jadi Kediri, Slawi, Magelang, dan Sumenep lebih didasarkan atas kriteria ketuaannya berdasarkan unsur penanggalan prasasti yang ditemukan di daerah bersangkutan. Sementara itu Harijadi Banyumas misalnya, lebih didasarkan atas pengangkatan Raden Jaka Kaiman oleh Sultan Hadiwijaya dari kerajaan Pajang, sebagai Adipati Wirasaba VII atau yang populer disebut Adipati Mrapat (Djoko Dwiyanto, 1994). Harijadi Kebumen lebih didasarkan atas pertimbangan politik pemerintahan, yaitu dengan mengacu pada momentum penyatuan antara wilayah Kebumen dan Karanganyar pada tanggal 1 Januari 1935 M (Djoko Dwiyanto, 1989). Oleh karena itu sebelum ditentukan, terlebih dahulu perlu disepakati kriteria untuk menetapkan Harijadi suatu daerah. Beberapa di antara kriteria itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipertanggungjawabkan secara Historis

Pertama-tama, suatu penetapan Harijadi suatu daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Artinya, momentum yang

dijadikan Harijadi sungguh merupakan peristiwa sejarah yang faktual. Hal ini penting ditekankan untuk menghindari penentuan Harijadi yang bersifat *ngayawara*, yang biasanya merupakan hasil studi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari sudut ilmu sejarah. Oleh karena itu, penelitian Harijadi Kabupaten Temanggung ini pertama-tama dititikberatkan pada penelitian historis faktual mengenai peristiwa-peristiwa historis yang bersangkutan-paut dengan daerah Temanggung. Kelemahan atau ketiadaan studi sejarah hanya akan mengakibatkan kegamangan dalam menentukan Harijadi daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, kriterium ini juga memenuhi surat Gubernur Jawa Tengah kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Tengah tertanggal 10 Agustus 1992, perihal Petunjuk Presiden mengenai Hari jadi suatu daerah, yang salah satu isinya ialah bahwa Harijadi tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Dengan demikian, kriterium ini memberikan dasar ilmiah sekaligus legalitas.

2. Terdapat Tokoh Historis Tertentu sebagai Penguasa atau Tetua Daerah Bersangkutan

Kriterium kedua ini erat kaitannya dengan kriterium pertama di atas, karena data historis menunjukkan bahwa setiap daerah atau kawasan yang mulai 'didirikan' bukanlah merupakan daerah yang 'tak bertuan'. Sebuah daerah atau kawasan didirikan tentu disertai dengan penetapan seorang pimpinan; entah pimpinan itu mengangkat dirinya sendiri atau diangkat oleh pihak lain yang lebih berkuasa, atau mungkin dipilih oleh warga masyarakat daerah itu. Tokoh yang memimpin itu boleh jadi seorang Raja, Adipati, atau jabatan lain yang fungsi dan peranannya mengatur perikehidupan bersama masyarakat daerah itu. Suatu daerah yang berdiri tanpa kepemimpinan sudah barang tentu menjadi daerah anarkhis. Oleh karena itu sangat penting ditunjukkan siapa tokoh yang memimpin daerah itu pada momentum historis yang dipilih sebagai Harijadi suatu daerah. Dalam hal daerah Temanggung pemilihan tokoh pemimpin seyogyanya dipilih seorang

Bupati atau Adipati atau pejabat yang setara dengan jabatan yang memimpin Temanggung pada kurun tertentu, karena sebenarnya yang hendak dicari adalah Harijadi Temanggung sebagai wilayah yang bertuan.

3. Sedapat Mungkin dicari dan dipilih Momentum yang Paling Tua

Apabila terdapat beberapa alternatif momentum sejarah, biasanya ada kecenderungan memilih yang tertua di antara momentum-momentum yang ada. Memilih yang tertua sebenarnya mengandaikan adanya kebanggaan bahwa daerah itu sebenarnya sudah lama eksis. Eksistensi suatu daerah dengan sendirinya mengandaikan eksistensi para pemukimnya; dan dengan eksistensi itu sebenarnya juga hendak ditunjukkan bahwa masyarakat daerah itu telah lama memasuki peradaban yang telah relatif maju dengan bukti adanya tatanan kehidupan yang relatif mapan dan teratur menurut ukuran jamannya.

Meskipun demikian, kriterium ketuaan ini hendaknya tidak dimutlakkan secara membabi buta, lebih-lebih kalau momentum yang paling tua itu secara historis kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang perlu diingat bahwa perlunya menengok masa lalu bukanlah demi masa lalu itu sendiri, melainkan lebih penting dari itu ialah proyeksi ke masa depan. Pengagungan kejayaan masa lalu yang tua hanya ada gunanya sejauh dapat memberi inspirasi dan dorongan bagi perwujudan kejayaan masa depan. Kenyataan historis menunjukkan bahwa suatu peradaban di suatu daerah atau kawasan tidak selalu terjalin keberlangsungannya. Terdapat cukup banyak peradaban yang timbul-tergelam, bahkan ada yang lenyap sama sekali, dan ada pula yang akhirnya berpindah kawasan. Hendaknya kenyataan ini dapat memberikan kearifan dalam menentukan pilihan Hari jadi.

4. Mencerminkan Identitas dan Citra Daerah

Di antara banyak faktor yang menentukan eksistensi suatu daerah adalah identitas dan citra yang merupakan penyangga utamanya. Citra

suatu daerah akan tampak mengesankan apabila didukung oleh identitas yang jelas. Identitas atau jatidiri suatu daerah bukanlah sekedar rumusan verbal-formal yang diucapkan dan ditulis di berbagai tempat dan kesempatan belaka, melainkan sungguh merupakan *Volksgeist* daerah itu yang terekspresikan lewat kehidupan kongkritnya. Ekspresi kehidupan kongkrit inilah yang menampilkan citra daerah itu.

Persoalan yang kemudian muncul ialah : Adakah korelasi yang signifikan antara jatidiri beserta citra daerah yang ditampilkannya dan Harijadinya ? Jawabannya dapat 'ada korelasi' dan 'tidak ada korelasi'. Orang dapat mengatakan 'tidak ada korelasi' dengan suatu pendirian bahwa suatu jatidiri dan citra sebuah daerah tidak ditentukan oleh suatu momentum tertentu, karena pada kenyataannya peradaban umat manusia berjalan secara evolutif dari jaman ke jaman. Orang juga dapat mengatakan 'ada korelasi' dengan pendirian bahwa meskipun suatu jatidiri dan citra itu merupakan hasil peradaban yang evolutif, namun evolusi peradaban tidak pernah berjalan secara mekanistik belaka. Menurut istilah Henri Bergson, evolusinya bersifat kreatif/ (*evolution creative*). Dengan demikian selalu ada fase-fase 'penyadaran' untuk mengarahkan gerak peradaban. Walaupun 'penyadaran' itu tidak dapat sekali jadi, namun tetap dapat dilacak momentum-momentum tertentu yang dianggap sebagai tonggak-tonggak historis yang memicu perubahan arah gerak peradaban. Tonggak-tonggak historis yang dimaksud dapat berupa peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap monumental, sehingga pendirian kedua inilah yang dapat menguatkan perlunya kriterium keempat ini.

5. Mengandung Nilai Kebangsaan

Meskipun kriterium keempat mengandaikan adanya identitas dan citra daerah, namun bukan berarti bahwa dengan itu akan ditumbuhkan semangat 'daerahisme'. Identitas suatu daerah selalu harus berada dalam kerangka identitas nasional. Oleh karenanya, suatu Harijadi

hendaknya mengandung nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kedaerahan bukan berdiri secara eksklusif di luar kerangka nilai kebangsaan, melainkan ia inklusif di dalamnya dan sekaligus menjadi unsur pemer kaya nilai nasionalisme.

Kesulitan pertama penentuan Harijadi yang memiliki nilai kebangsaan biasanya diawali dengan pertikaian pandangan tentang makna nasionalisme. Pandangan yang sempit cenderung memakai nasionalisme sebagai segala sesuatu yang bukan berasal dari luar. Konsekuensi pandangan ini ialah bahwa momentum yang dipergunakan sebagai Harijadi harus terletak pada masa 'pra-kolonial' atau 'pasca-kolonial'.

Sesungguhnya nasionalisme itu lebih merupakan ikatan-ikatan banyak faktor yang beraneka ragam, tergantung dari sudut pendekatannya. Para teoritis mencoba merumuskan nasionalisme dengan berbagai cara, namun satu hal yang esensial ialah perasaan senasib dan sepenanggungan dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, baik kesamaan pengalaman sejarah, daerah atau wilayah, kehidupan ekonomis, sosial, politis, bahasa maupun kebudayaan umumnya (Bdk. Snyder, 1954). Perasaan senasib sepenanggungan itulah sebagai pengikat yang kokoh, sehingga mampu menumbuhkan solidaritas yang pekat di antara anggota masyarakat. Solidaritas berarti kesediaan untuk membangun kehidupan bersama dengan disemangati kesetiakawanan satu sama lain (Magnis Suseno, 1992).

Dengan demikian, peluang alternatif penentuan suatu Harijadi yang mengandung nilai-nilai nasionalisme tidak harus dipagari secara ketat hanya pada masa pra dan pasca-kolonial, melainkan lebih terbuka untuk masa manapun sejauh secara esensial memang didapati nilai-nilai nasionalisme yang hakiki. Sesungguhnya rasa nasionalisme, sebagaimana diajarkan oleh peristiwa-peristiwa sejarah, acapkali tumbuh dan berkembang justru pada saat terjadi penjajahan. Di sinilah

dituntut kejelian kita untuk membedakan mana yang esensial dan mana hal-hal yang atributif belaka.

6. Mermiliki Nilai Edukatif

Dengan nilai edukatif dimaksudkan agar suatu Harijadi dapat memberikan 'pelajaran', 'hikmah', atau semacam 'penyadaran' kepada warga masyarakat daerah bersangkutan, lebih-lebih generasi muda sebagai penerus sejarah, agar mereka memahami dan menghayati bahwa apa yang ada sekarang ini bukanlah sesuatu yang begitu saja terwujud, melainkan melalui proses panjang yang meliputi segala daya dan upaya segenap lapisan masyarakat daerah itu. Kewajiban generasi berikutnya adalah untuk menghargai jerih payah generasi pendahulunya dan sekaligus memperkembangkannya demi kemajuan kehidupan di masa depan. Dengan dididik oleh sejarah, orang dapat mengambil pelajaran akan kesuksesan maupun kegagalan para pendahulunya. Inilah pelajaran yang penting dari sejarah, karena sesungguhnya 'masa kini' senantiasa dimuati 'masa lalu' dan sekaligus mengandung benih proyeksi 'masa depan'.

7. Menimbulkan Kebanggaan Masyarakat

Sebagai makhluk hidup yang berkesadaran, manusia bukan hanya menuntut pemenuhan kebutuhan fisiologis semata-mata. Menurut Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kemudian berturut-turut kebutuhan perlindungan dan rasa aman, cinta dan rasa memiliki-dimiliki, harga diri dan penghargaan dari orang lain, kemudian aktualisasi diri (Goble, 1987). Jenjang kebutuhan yang relevan dengan kriterium yang ketujuh ini adalah harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri, menurut Maslow, meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetisi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. Sementara itu penghargaan dari orang lain meliputi prestise, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan.

Dalam konteks masyarakat Temanggung, mereka juga ingin memenuhi kebutuhan sebagaimana disebutkan, yang secara akumulatif kiranya dapat dicakup dalam kategori 'kebanggaan'. Oleh karena itu wajar apabila Harijadi yang dipilih hendaknya mampu memenuhi kebutuhan akan kebanggaan itu. Namun demikian kebanggaan janganlah tergelincir ke arah arogansi yang dapat mengakibatkan rasa puas diri yang membius, yang pada gilirannya justru dapat membuahkan kemalasan untuk memperkembangkan diri dan memajukan daerahnya. Kebanggaan hanya ada gunanya sejauh dapat menumbuhkan dan meneguhkan sikap *duwe rasa handarbeni, melu hangrungkebi, serta mulat salira hangrasa wani* terhadap daerahnya.

8. Dapat Diterima oleh Masyarakat Luas

Kriterium terakhir yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa Harijadi yang ditetapkan hendaknya dapat diterima oleh masyarakat luas. Penerimaan secara luas ini bersifat relatif, artinya tidak mungkin dapat memuaskan secara total kepada semua pihak. Namun demikian tetap akan diusahakan sedapat mungkin memuaskan semakin banyak pihak. Ketidakpuasan banyak pihak dikhawatirkan akan berakibat munculnya rasa frustrasi massal dan akibat yang lebih jauh dapat menumbuhkan benih-benih disintegrasi yang tidak perlu. Dengan semakin banyaknya pihak yang terpuaskan, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi untuk mendorong semangat membangun dengan segala konsekuensinya. Lagi pula, kriterium kedelapan ini juga merupakan salah satu petunjuk Presiden lewat Surat Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan kepada segenap Bupati di wilayahnya tertanggal 10 Agustus 1992, yang isinya bahwa Harijadi harus dapat diterima warga masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kedelapan kriteria di atas merupakan kriteria yang ideal, tetapi hendaknya disadari bahwa apa yang dianggap ideal itu belum tentu akan tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, belum tentu setiap alternatif pilihan

Harijadi dapat memenuhi semua kriteria tadi. Namun demikian, akan tetap diusahakan menjatuhkan pilihan pada alternatif yang dianggap paling banyak memenuhi kriteria yang dipancarkan, dengan - keharusan terpenuhinya kriterium pertama.

B. Beberapa Momentum sebagai Pertimbangan Penentuan Harijadi Temanggung

Berdasarkan uraian tentang latar belakang sejarah di muka dapat diketahui bahwa ada beberapa momentum peristiwa sejarah yang pantas diajukan sebagai alternatif dengan disertai unsur penanggalan yang dapat dijadikan penanda Harijadi Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan latar belakang sejarah dan peristiwa yang terungkap dapat diusulkan beberapa alternatif sebagai berikut :

1. 15 Juni 850 masehi

Unsur penanggalan ini didasarkan atas prasasti Tulang Air tahun çaka 772 atau 850 masehi. Adapun unsur penanggalan prasasti ini secara lengkap adalah "swasti sakawarsatita 772 asadamasa tithi dwitya suklapaksa. Tu. Pa. A. wara" atau sama dengan tahun çaka 772 bulan Asada tanggal dua, paro-terang, paringkelan Tuglai, hari pasaran atau siklus lima Pahing, dan hari siklus tujuh Aditya. Unsur hari di atas jika dikonversikan ke dalam tarikh masehi sama dengan hari **Minggu Pahing, tanggal 15 Juni tahun 850 masehi.**

Di antara isi penting dalam prasasti ini adalah disebutkannya Rakai Pikatan dengan gelar "ratu" seperti dalam kutipan ini: (3) "...tarka-(4) la rakai patapan pu manuku manusuk sima I tulaing air ra(5) tu tatkala rakai pikatan ...dst". Sebutan itu kemudian melahirkan interpretasi bahwa pertama, bagi seseorang yang bergelar "ratu" menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mendirikan kerajaan sekaligus dinasti (L.Ch. Damais, 1949: 4). Kedua, jika dalam prasasti ini telah disebut dengan gelar "ratu",

maka diduga keras ia telah mulai memerintah jauh sebelumnya. Berdasarkan tinggalan prasasti yang pernah ditemukan kembali, nama Rakai Pikatan disebut pertama kali atau memerintahkan penulisan prasasti terdapat pada prasasti tahun caka 732 atau 810 masehi.

Selain isi prasasti ini cukup penting, tokoh Rakai Pikatan juga cukup populer pada jamannya karena selain menyerahkan kekuasaannya secara langsung kepada penggantinya, yaitu Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sajanottsawattungga dan kemudian menjadi cakrawartin bergelar Jatiningrat. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang melakukan perkawinan campuran, karena Rakai Pikatan sendiri sebagai pemeluk agama Hindu yang taat, terbukti dengan perintahnya mendirikan bangunan suci bagi dewa Siwa (*siwagrha*). Kemudian dia menikah dengan Pramodhawardhani anak Samarottungga, yang bergama Budha. Menyusul peristiwa ini, Rakai Pikatan kemudian ikut menyumbang mendirikan bangunan suci untuk isterinya, yang dikenal dengan kompleks percandian Plaosan Lor.

Demikian populernya Rakai Pikatan pada masanya, maka tidak mengherankan jika penghormatan kepadanya diwujudkan dengan berbagai tinggalan. Salah satu tinggalan yang digunakan untuk mengenang dan mengabadikan namanya adalah sumber mata air Pikatan di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.

2. Tanggal 2 April 907 masehi

Unsur penanggalan ini didasarkan atas prasasti Kedu atau yang sering dikenal dengan sebutan prasasti Mantyasih yang secara lengkap kutipannya adalah sebagai berikut : "**swasti sakawarsatita 829 caitramasa. tithi ekadasi krsnapaksa, tu.u.ça wara ..**" dst. Unsur penanggalan ini jika dirinci terdiri atas tanggal 11 parogelap, hari tunglai (siklus enam), umanis atau legi (siklus lima/pasaran), dan Sabtu (siklus tujuh), bulan Caitra (22 Maret – 21 April) tahun 907 Masehi. Penanggalan ini jika digabung dan dibaca secara populer berbunyi Sabtu Legi, tanggal 11 Caitra tahun 829 Syaka atau jika dikonversi menjadi tanggal 2 April 907 masehi. Adapun pejabat yang memerintahkan penetapan *sima* adalah Sri

Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodayamasambhu, yaitu seorang raja yang memerintah kerajaan Mataram Kuna dari tahun 869 – 910 masehi. Tokoh ini sangat dikenal sangat kontroversial dalam panggung sejarah Indonesia Kuna, karena selain tidak jelas asal usulnya juga banyak mengeluarkan prasasti yang bertentangan satu sama lainnya. Sebagian besar prasastinya ditemukan kembali di sekitar wilayah Temanggung dan Prambanan. Di dalam prasasti ini dia juga menyebut peristiwa perkawinannya, yaitu "... sangka yang makwaih buatthaji. Iniwönya I sri maharaja kala ni warangan haji ..." dst. Di bidang spiritual dia merestui pemujaan terhadap lima bangunan suci, yaitu di Malangkuseswara, di Puteswara, di Kutusan, di Silabhedeswara, dan di Tuleswara.

Pada masa pemerintahan Balitung ini beberapa pengetahuan juga mulai dikenal lebih jelas, misalnya disebutkan lakon wayang Ramayana dalam prasasti Sangsang dan Watukura. Selain itu salah satu prasastinya, yaitu prasasti Telang tahun 825 Syaka atau 903 Masehi yang ditemukan di Wanagiri membuktikan telah dikenalnya *ferry* penyeberangan yang menghubungkan tepian barat dan timur Bengawan Solo.

3. 10 November 1834

Penanggalan ini adalah Harijadi Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diperingati selama ini. Unsur penanggalan itu menandai perubahan nama Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung yang saat itu dipimpin oleh R.T. Arjo Djojonegoro. Meskipun telah ditetapkan lebih dari tujuh belas tahun silam, tetapi gaungnya tidak terlalu nyaring di kalangan masyarakat, kecuali di lingkungan pemerintahan sebagai rangkaian acara seremonial. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada masa itu secara 'nasional' sedang terjadi aneksasi, yaitu pengambilalihan wilayah dari kekuasaan kerajaan Mataram (Surakarta dan Yogyakarta) sebagai akibat terjadinya Perang Diponegoro (Perang Jawa) yang menyebabkan kebangkrutan Pemerintah Hindia Belanda di tanah jajahan. Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa inisiatif, prakarsa, perintah, paksaan, dan intervensi datangnya dari Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian jika peristiwa itu diperingati sebagai harijadi atau hari lahir, maka niscaya tidak membangkitkan kebanggaan bahkan kurang memiliki rasa kebangsaan. Hal lain yang lebih menekan adalah karena penanggalan ini jatuh pada tanggal 10 November, yang di kehidupan kenegaraan Indonesia dikenal sebagai Hari Pahlawan, sehingga dapat menimbulkan ironi. Peringatan suatu kelahiran bersamaan dengan peringatan nasional yang berkaitan dengan kematian.

Oleh karena itu selanjutnya untuk menentukan tanggal yang sesuai sebagai Harijadi, maka alternatif yang disajikan di atas kemudian diuji silang dengan kriteria yang telah ditetapkan di atas. Dengan menggunakan matriks 'popularitas' diharapkan dapat dipilih salah satu tanggal dari alternatif di atas sebagai bahan penetapan harijadi.

C. Penghitungan Alternatif Harijadi Kabupaten Temanggung

Setelah dilakukan pengkajian terhadap sumber sejarah yang dapat dijangkau dalam pengkajian ini, maka beberapa unsur penanggalan telah dikutip di muka yang dapat diusulkan sebagai alternatif penetapan harijadi. Bukti-bukti tentang unsur-unsur penanggalan di atas jika dikaitkan dengan kriteria penetapan harijadi diharapkan dapat ditemukan alternatif harijadi yang sesuai dengan kriteria dengan argumentasi yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Setelah dilakukan pengkajian terhadap beberapa temuan unsur penanggalan sesuai dengan momentum peristiwa yang diperingati dan mengingat pula beberapa kriteria yang telah ditetapkan, maka selanjutnya akan dilakukan penghitungan dengan teknik atau tata cara penentuan peringkat di antara temuan itu. Adapun teknik atau tata cara penentuan peringkatnya dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

Matriks alternatif Hari jadi Kabupaten Temanggung

No.	Kriteria ! V	Alternatif →	15/06/ 850 M	02/04/ 907 M	10/11/ 1834	Lain- nya
1.	Dapat dipertanggungjawabkan		0,3	0,3	0,3	-
2.	Ada Tokoh Historis		1	2	3	-
3.	Momentum tertua		1	2	3	-
4.	Identitas dan citra daerah		1	3	2	-
5.	Mengandung Nilai kebangsaan		0,3	0,3	0,3	-
6.	Memiliki nilai eduktaif		1	2	3	-
7.	Membangkitkan motivasi dan kebanggaan		1	2	3	-
8.	Dapat diterima masyarakat		1	2	3	-
	Jumlah skor =		6,6	13,6	17,6	-
	Peringkat =		I	II	III	-

Catatan :

Mekanisme kerja dilakukan dengan cara memberi skor terhadap alternatif tanggal untuk setiap kriteria, dengan ketentuan angka /skor sama dengan peringkat (juara), sehingga hasil akhir yang menunjukkan jumlah paling kecil adalah sang juara atau yang (berhak) dipilih. Untuk peringkat yang sama dalam perhitungan/penuisan angkanya dibagi, sehingga menjadi setengah-setengah (jika dua yang sama) atau sepertiga-sepertiga (jika tiga yang sama).

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dengan delapan kriteria dan dari tiga alternatif penanggalan yang ditemukan dalam kajian latar belakang sejarah, ternyata yang memiliki jumlah paling kecil atau menduduki peringkat pertama dan menjadi juara pertama adalah penanggalan **15 Juni 850** masehi dengan jumlah skor 6,6. Alternatif lain peringkat II dengan skor 13,6 adalah tanggal 2 April 907, peringkat III dengan skor 17,6 adalah tanggal 10 November 1834. Dengan demikian

peringkat pertama dapat diusulkan sebagai bahan penetapan Harijadi Kabupaten Temanggung, yaitu bertepatan dengan peristiwa sejarah penetapan *sima*, daerah perdikan, di Tulang Air oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nama ini sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya Temanggung, sehingga dapat membangkitkan rasa bangga, rasa memiliki, sekaligus mendorong semangat dan motivasi untuk ikut membangun daerahnya.

Demikianlah cara perhitungan untuk memilih alternatif harijadi Kabupaten Temanggung, sehingga sebenarnya semakin banyak kriteria yang disepakati hasilnya semakin representatif. Demikian pula jika semakin banyak alternatif penanggalan atau peristiwa sejarah yang ditemukan kemudian diunggulkan, akan semakin tampak perbedaan dan nilai penting dari alternatif yang terpilih.

LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB IV

KONSEP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PENDEKATAN STUDI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Pendekatan yang digunakan dalam Pengembangan Kebudayaan dalam rangka Penelusuran Kembali Harijadi Kabupaten Temanggung adalah : Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Base Development*); Pendekatan Pengembangan Seni dan Budaya Berkelanjutan (*Sustainable Art and Cultural Development*); Pendekatan Industri Budaya (*Cultural Industry*); dan Pendekatan Pelestarian Dinamik Aset Kebudayaan Temanggung (*Dynamic Preservation and Conservation*). Secara ringkas masing-masing pendekatan tersebut akan disampaikan sebagai berikut :

(1). **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Base Development*)**

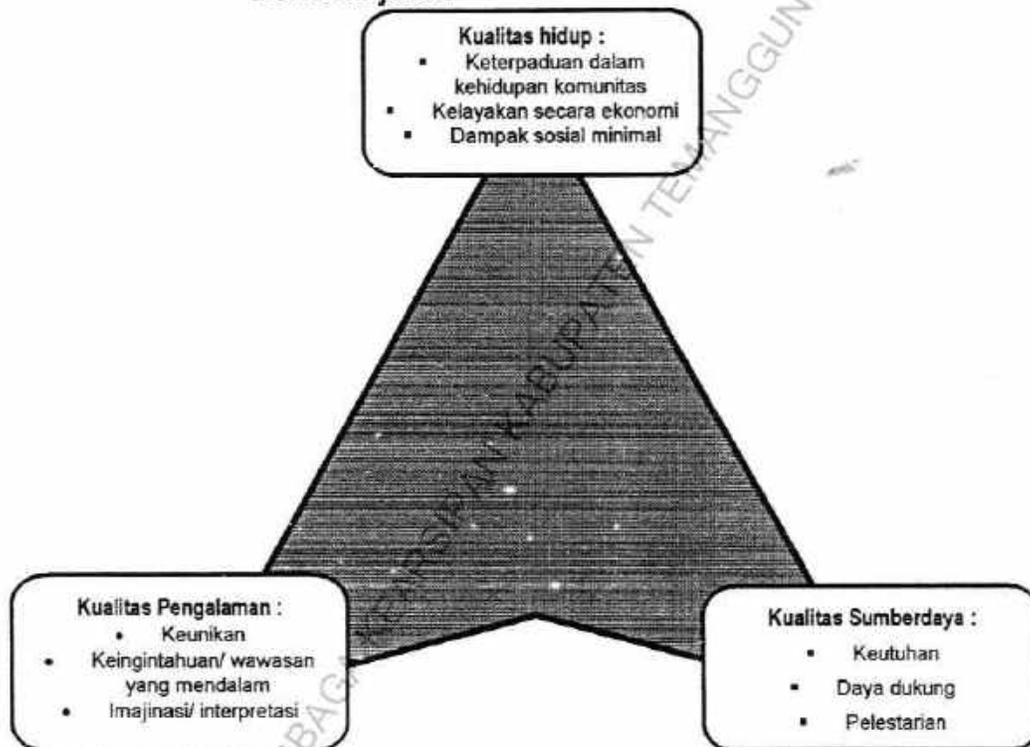
Pengembangan masyarakat lokal selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- Meningkatkan pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal
- Memanfaatkan segala aspek yang berkaitan dengan kesenian yang ada di dalam suatu masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan guna memberikan nilai tambah kepada masyarakat itu sendiri.

(2). **Pengembangan Seni dan Budaya Berkelanjutan** (*Sustainable Art And Cultural Development*)

Prinsip pengembangan berkelanjutan tersebut dapat tercapai jika pengembangan sumber daya seni dan budaya dapat menciptakan sinergi pengembangan dari tiga aspek pokok yang terkait di dalamnya, yaitu meliputi :

Gambar 4.1. Diagram Pembangunan Seni dan Budaya Berkelanjutan



- a. Kualitas pengalaman (dari sisi konsumen), yaitu bahwa upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya seni dan budaya agar mampu memberikan kualitas pengalaman yang maksimal bagi konsumen/pengunjung/penikmat, khususnya dari segi keunikan, interpretasi dan pemahaman serta wawasan mengenai objek secara utuh dan mendalam.

- b. Kualitas sumber daya (seni dan budaya), yaitu bahwa upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya seni dan budaya diharapkan dapat tetap menjaga kelangsungan dan keutuhan sumber daya seni dan budaya dengan memperhatikan daya dukung serta upaya pelestarian terhadap objek yang ada.
- c. Kualitas hidup (masyarakat lokal), yaitu bahwa upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya seni dan budaya agar mampu memberikan nilai manfaat ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan mampu mendorong pengembangan dan pelestarian sumber daya seni dan budaya yang ada.

(3). **Pendekatan Industri Budaya** (*Cultural Industry*)

Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dengan nuansa pariwisata yang didasarkan atas konsep "industri" adalah bukan memperlakukan budaya sebagai komoditi (*culture as a commodity*), namun budaya sebagai industri atau *culture industry*. Pengertian "industri" dalam konteks budaya ini, perlu dipahami secara mendalam, artinya bukan berarti "industri" dalam arti "fabrikasi" dan "masalisasi". Namun budaya sebagai suatu kegiatan "industri" di dalamnya mencakup pemahaman terpadu antara:

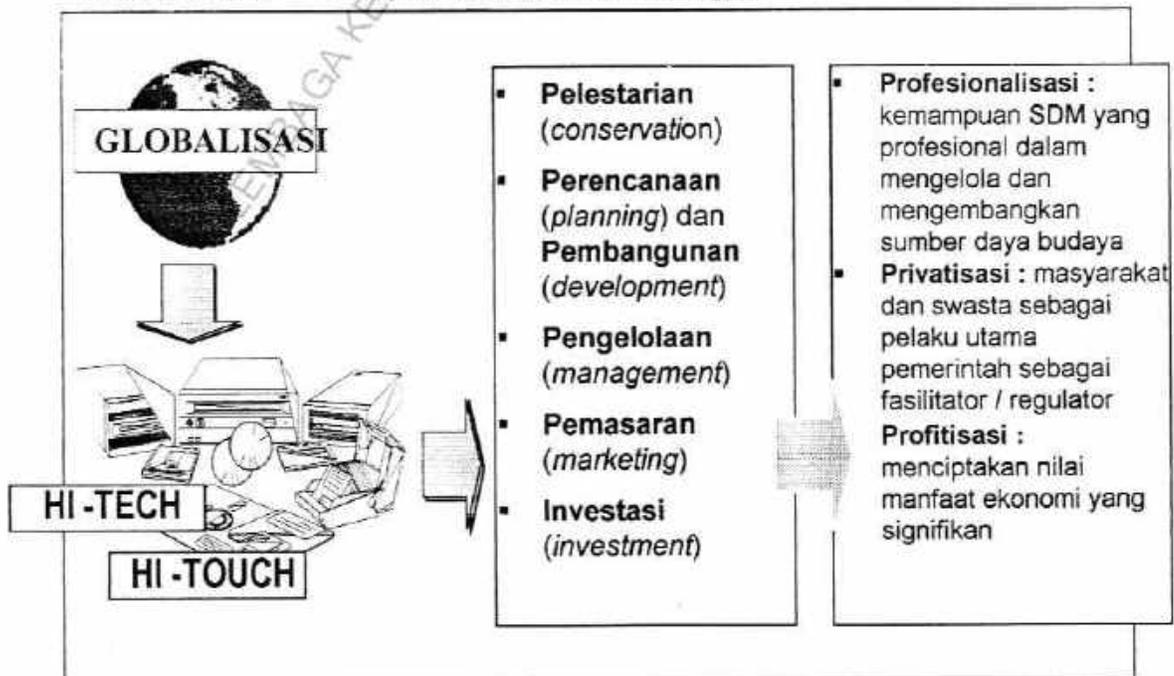
- a. Pelestarian (*conservation*)
- b. Perencanaan (*planning*) dan Pembangunan (*development*)
- c. Pengelolaan (*management*)
- d. Pemasaran (*marketing*)
- e. Investasi (*investment*)

Konsep pengembangan budaya sebagai industri merupakan langkah "survival" penting dan strategis memasuki era globalisasi sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh karena kekuatan sumber daya budaya khususnya, budaya yang hidup (*living culture*) mempunyai karakter paradoksal yang "high tech" dan sekaligus "high touch".

Beberapa hal yang perlu untuk dijadikan dasar-dasar pijakan dalam pengembangan industri budaya, meliputi :

- a. **Profesionalisasi**, bahwa aktor-aktor (pelaku) yang berperan tidak dapat lagi sebagai pelaku amatiran, namun memiliki kemampuan profesional.
- b. **Privatisasi**, peluang dan kesempatan yang luas bagi swasta maupun masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam seluruh mata rantai pembangunan dan pengelolaan.
- c. **Profitisasi**, yaitu menempatkan "profit" atau dampak manfaat ekonomi yang signifikan sebagai salah satu faktor perencanaan pembangunan kebudayaan dengan nuansa pariwisata.

Gambar 4.2. Pendekatan Industri Budaya



(4). **Pendekatan Pelestarian dan Pengembangan Dinamis Aset Kebudayaan Temanggung** (*Dynamic Preservation and Conservation*)

a. Pelestarian Dinamik Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Sebagai tinggalan budaya yang bersifat tekstual maupun artefaktual setiap peninggalan budaya (sumber daya budaya) dibina dan dikembangkan sesuai dengan rambu-rambu seperti disebut dalam pasal 32 UUD 1945 yang mengandung dua perintah, yaitu : (1). memajukan kebudayaan bangsa (progresif) dan (2). Melestarikan kebudayaan bangsa (preservatif). Oleh karena itu pegangan utama dalam pengembangan tinggalan budaya (material dan immaterial), sebagai salah satu elemen kebudayaan, adalah **konsep pelestarian yang dinamis** yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Konsep ini menekankan bahwa pelestarian tanpa pemanfaatan adalah perbuatan yang sia-sia dan lama kelamaan akan runtuh tidak ada artinya.

Perencanaan dan pengembangan sumber daya budaya, khususnya budaya bendawi, dilakukan dengan pendekatan preservasi yang didahului dengan analisis objektif berdasarkan :

- a. **Aspek besaran** : faktor ukuran (metrik) yang dimiliki oleh objek yang bersangkutan
- b. **Aspek keragaman** : tingkat variasi yang dimiliki oleh wujud fisik benda yang bersangkutan
- c. **Aspek kandungan informasi** : prospek dan potensi informasi yang dikandung oleh objek yang bersangkutan
- d. **Aspek keterawatan** : kondisi fisik (tingkat kerusakan, persentase yang tersisa, dan sebagainya) terakhir dari objek yang bersangkutan

Cakupan pengertian ini akan sedikit lebih dipersempit, dengan menambahkan bahwa, suatu benda budaya memiliki signifikansi yang tinggi jika berusia 50 tahun ke atas, atau dibawah 50 tahun tetapi

memiliki nilai penting tertentu (subjektivitas seorang pakar dapat digunakan sebagai parameter) misalnya dari segi :

- a. Keilmuan (*science*)
- b. Kesejarahan (*historical*)
- c. Keetnisan / kebudayaan (*ethnic*)
- d. Kemasyarakatan (*public*)
- e. Hukum (*legal*)

Pemaknaan itu juga dapat berujud dalam hal :

- a. Keindahan (*aesthetic*)
- b. Mewakili suatu tipe tertentu (*typical*)
- c. Kelangkaan (*scarcity*)
- d. Mewakili peran sejarah (*historical role*)
- e. Dapat meningkatkan kualitas area sekitarnya (*enchacement of adjacent areas*)
- f. Merupakan sesuatu yang superlatif (*superlative*)

Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi atas nilai penting suatu objek tinggalan budaya juga perlu dipertimbangkan :

- a. **Ketertarikan Lokal** (*Local interest*) : menangkap, memahami, dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, serta menyertakan mereka dalam tahap-tahap pelaksanaan pelestarian
- b. **Kepentingan** (*Urgency*) : menentukan dan menetapkan komponen benda, kelompok benda, kelompok benda atau kawasan budaya yang perlu mendapat prioritas untuk ditindak lanjuti lebih jauh
- c. **Variasi** (*Variety*) : aspek keanekaragaman elemen dalam kawasan, semakain tinggi pula skala prioritasnya

Dengan tidak membatasi diri pada sekedar *native heritage*, selain pertimbangan di atas perlu pula diperhitungkan faktor-faktor berikut

- a. **Faktor Ekonomi** (*Economic Factor*) : tujuan aspek ekonomi terutama untuk menentukan kebijaksanaan

pengembangan kegiatan dalam kawasan konservasi dari berbagai kegiatan yang tumbuh disekitarnya dan diharapkan dapat mengembangkan keinginan masyarakat secara ekonomis.

- b. **Faktor Politik (*Political Factor*)** : kebijaksanaan pengembangan kota/perkotaan (RUTRK, RDTRK) sebagai landasan penerapan kebijaksanaan
- c. **Faktor Fisik (*Phsyscal Factor*)** : kebijakan pemanfaatan lahan khususnya dalam suatu wilayah yang akan digunakan untuk menentukan batas wilayah pengembangan, baik pengaruh maupun kaitan sejarah.

Selanjutnya pendekatan pelestarian dinamis ini dapat diterapkan terhadapinggalan budaya yang bersifat kasat mata (*tangible*) dan bersifat tidak kasat mata (*intangibile*), misalnyainggalan arkeologi (purbakala) dan sejarah, adapt dan tradisi, karya seni (seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni pertunjukan lain), dan seni resitasi.

Sejumlah tindakan atau langkah strategis dapat dilakukan, antara lain dalam bentuk : (1) perlindungan, (2) pemeliharaan, (3) revitalisasi, inovasi, dan modifikasi, dan (4) pengelolaan dan pemanfaatan secara ekonomis.

1. Perlindungan

Langkah strategis perlindungan mencakup perlindungan (1) kultural, (2) sosio-politis, (3) ekologis, dan (4) yuridis

a. **Perlindungan kultural** dimaksudkan untuk melindungi keunikan langgam budaya tertentu dari pengaruh luar, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

b. **Perlindungan sosio-politis** dimaksudkan sebagai langkah pencegahan atas terjadinya intervensi, manipulasi, dan eksploitasi terhadapinggalan budaya demi kepentingan individu atau kelompok sosial dan atau kelompok politik tertentu.

c. **Perlindungan ekologis** dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan ekosistem budaya dari pencemaran yang dapat mengakibatkan disharmoni dan bahkan kerusakan ekologis. Disharmoni atau kerusakan ekologis atas tinggalan budaya dapat berupa baik disharmoni fisik-natural maupun sosio-kultural..

d. **Perlindungan Yuridis (Pemeliharaan)** dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tinggalan budaya dari aspek legal formal, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek perlindungan dalam pendekatan pelestarian dinamis juga melibatkan aspek pemeliharaan. Pemeliharaan tinggalan budaya secara garis besar dapat dipilah menjadi tiga hal, yaitu pemeliharaan **(1) fisik, (2) non-fisik, dan (3) pendokumentasian.**

1). **Pemeliharaan fisik** meliputi perawatan yang mengganggu baik hal-hal yang bersifat biotik maupun abiotik.

2). **Pemeliharaan non-fisik** meliputi perawatan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam tinggalan budaya bersangkutan

3). **Pendokumentasian** dimaksudkan sebagai "pengawetan historis" dan sekaligus "bahan rujukan" bagi studi dan pengembangan di masa yang akan datang..

Selain beberapa pendekatan di atas dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak kalah pentingnya juga melibatkan dua hal yang mendukung, yaitu (a). Penyediaan kelembagaan, (b). Penanaman Investasi, dan (c).. Penyediaan Sarana dan Prasarana.

(a). Penyediaan Kelembagaan yang bersifat manajerial diperlukan untuk mengelola baik dari sudut pelestarian dan pemeliharaan maupun pengembangan kebudayaan, terutama jika dilihat dari sudut pandang itu

bisnis (*profit oriented*). Lembaga ini bertanggung jawab atas pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam komunitas pendukung budaya bersangkutan dan masyarakat sekitarnya.

(b). **Penanaman Investasi** dimaksudkan agar pengembangan kebudayaan tidak memberikan kesan seolah-olah hanya dimiliki oleh pihak tertentu, misalnya pemerintah daerah. Masyarakat dan swasta diberi peluang yang sama dalam ikut bertanggung jawab melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.

(c). **Penyediaan Sarana-Prasarana** dimaksudkan agar pengembangan kebudayaan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak ada alasan merasa terhambat. Penyediaan sarana dan prasarana ini tidak harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat melibatkan masyarakat dan swasta.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil pengkajian dan rekonstruksi sejarah Temanggung sebagai bahan penelusuran kembali Harijadi yang disajikan di muka telah berusaha mengeksplorasi berbagai sumber, baik yang bersifat tekstual maupun artefaktual. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempertebal dan mengukuhkan jatidiri Kabupaten Temanggung dalam menyongsong pembangunan di era otonomi daerah dan globalisasi.

Penelusuran kembali harijadi telah melahirkan beberapa alternatif penanggalan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan penetapan dengan argumentasinya masing-masing. Alternatif penanggalan itu setelah dikaji silang dengan kriteria yang telah disepakati bersama, akan melahirkan pilihan tanggal harijadi yang diharapkan selain dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Selanjutnya setelah melalui diskusi dan sosialisasi dengan masyarakat seluas-luasnya, temuan penanggalan itu dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Eksekutif.

Berdasarkan hasil kajian terhadap unsur penanggalan yang menandai peristiwa sejarah di Kabupaten Temanggung telah ditemukan sekurang-kurangnya empat alternatif, yaitu tanggal .. April 850 Masehi,Agustus 907 Masehi,... 1789, dan 10 November 1834. Keempat alternatif itu setelah dikaji berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, ternyata yang menduduki peringkat teratas adalah tanggal ... April 850 masehi. Penanggalan itu menandai ditetapkannya suatu daerah menjadi sima, daerah perdikan, oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Apabila didukung oleh segenap komponen masyarakat di Kabupaten Temanggung, maka

pada saatnya penanggalan ini yang dilengkapi dengan Risalah yang melatar belakangi dapat diajukan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas selanjutnya dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sesuai dengan kerangka acuan kerja studi ini juga telah menghasilkan beberapa konsep pengembangan kebudayaan Kabupaten Temanggung, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan kebudayaan selanjutnya. Di antara empat pendekatan yang ditawarkan, yang dianggap paling sederhana dan dapat dijadikan prioritas utama adalah pendekatan pelestarian dinamis. Konsep ini sudah sangat lazim dan sudah diterapkan di beberapa wilayah, sehingga tinggal menambahkan nuansa peran serta masyarakat jika akan dilaksanakan.

B. SARAN

Salah satu konsekuensi logis dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesiapan aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pemerintahan dengan kewenangan yang melekat padanya. Salah satu jiwa otonomi daerah itu adalah transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sejak dari perencanaan sampai evaluasi. Oleh karena itu perlu diciptakan peluang dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah, sehingga selain dapat ikut menikmati juga dapat merasa 'handarbeni'/memiliki. Salah satu wahana partisipasi masyarakat adalah memiliki motivasi dan dukungan terhadap setiap program yang diintroduksikan oleh pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

PENELUSURAN KEMBALI HARIJADI & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

- Bambang Soemadio ed. Dkk., 1992, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid II, Balai Pustaka, Jakarta.
- "Babad Kedu", No. PBC 184, Koleksi Perpustakaan Museum Sana Budaya Yogyakarta.
- Boechari, 1966, "Preliminary report on the discovery of an Old Malay inscription at Sojomerto (North Central Java)", *MISI*, III, no. 2 & 3, hlm. 241-151.
- Boechari, 1976, "Some considerations of the problem of the shift of Mataram's center of government from Central to East Java in 10th century A.D." *Bulletin of the Research Centre of Archaeology*, no. 10, Jakarta.
- Boechari, 1978, "Bahan Kajian Arkeologi untuk Pengajaran Sejarah", *Majalah Arkeologi*, Th.II, No. 1, September, hlm. 3 - 26.
- Brandes, J.L.A., 1913, *Oud-Javaansche Oorkonden, Negelaten Transcripties Door Dr. N.J. Krom, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap*.
- Casparis, J.G. de, 1950, "Inscripties uit de Cailendra-tijd", *Prasasti Indonesia*, I, A.C. Nix & Co, Bandung.
- Casparis, J.G. de, 1956, "Selected Inscriptions from the 7th to the 9th century A.D.", *Prasasti Indonesia*, II, Masa Baru, Bandung.
- Casparis, J.G. de, 1958, "Short inscription from Candi Plaosan Lor", *Berita Dinas Purbakala*, no. 4, Jakarta.
- Djoko Dwiyanto, 1975, "Situasi Pemerintahan, sosial-Ekonomi Menjelang Akhir Periode Jawa Tengah", *Skripsi Sarjana Muda*, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas GadjahMada, Yogyakarta.
- Djoko Dwiyanto, 1981, "Laporan Penjajagan Lokasi Candi Perot", Laporan Penelitian, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Tengah.
- Djoko Dwiyanto, 1986, "Manfaat Studi bahasa dalam prasasti terhadap perkembangan Studi Kebudayaan Jawa Kuno (Suatu Studi Rintisan)", *Laporan Penelitian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Djoko Dwiyanto, 1986, "Pengamatan terhadap Data Kesejarahan dari Prasasti Wanua Tengah III tahun 908 M", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi* IV, hlm. 92-110.
- Djoko Dwiyanto, 1989, *Penelitian Sejarah dan Harijadi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah*.
- Djoko Dwiyanto dkk., 1991, *Harijadi dan Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga*, Jawa Tengah.

- Grantes, J., 1913, "Slecht werk aan de Hindu-Oudheiden op Java", in *Rapporten Oudheidkundigen Dienst*, Batavia: Albrecht & Co, 1914, hlm. 160 – 176.
- Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indie, 1930, *Oudheidkundig Verslag*, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia: Albrecht & Co, 1931, hlm. 25 – 26.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung, 1997, *TEMANGGUNG: Tempo Dulu, Sekarang serta Prospek di Masa Mendatang*.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, 2002, *Temanggung dalam Angka*.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2001, *Rencana Revisi RTRW Kabupaten Temanggung*, Tahun Anggaran 2002.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2001, *Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Temanggung*, Tahun anggaran 2001.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2002, *Perencanaan Strategis Kabupaten Temanggung 2002 – 2006*, (draft – belum dipublikasikan).
- Ronkels, PH. S. van, 1901, *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde*, Batavia: Albrecht & Co, hlm. 482 – 487.
- Sartono Kartodirdjo, ed. dkk., 1984, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Suroyo, A.M. Djuliaty, 2000, "Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800 – 1890", *Untuk Yayasan Indonesia*, Yogyakarta.
- Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1891, Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 137 – 141.

Suplemen :

**DAFTAR NAMA DAN MASA PEMERINTAHAN
BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 1834 – 2003**

No.	NAMA ADIPATI/BUPATI	TAHUN PEMRTHN.
1.	Raden Tumenggung Ario Djojonegoro	1834 – 1848
2.	Raden Adipati Ario Holand Soemodilogo	1848 – 1878
3.	Raden Tumenggung Ario Holand Soemodirdjo	1848 – 1878
4.	Raden Tumenggung Tjokroatmodjo	1882 – 1906
5.	Raden Mas Adipati Ario Tjokroadikoesoemo	1906 – 1923
6.	Raden Adipati Ario Tjokrosoetomo g.s.g.st	1923 – 1943
7.	Raden Tumenggung Singgih Hadipoero	1943 -1945
8.	Raden Tumenggung Maktal Dipodirdjo	1945 – 1923
9.	Raden Sutigwo	1945 -1949
10.	Raden Soemarsono Notowidagdo	1949 -1953
11.	Mas Kartono	1953 -1957
12.	Raden Soedarso (Kepala Daerah) R.S. Prodjosoepadmo (Bupati)	1957 –1960
13.	Raden Said Mangoensoediro (Pejabat Bupati)	1960 – 1923
14.	Raden Ngabehi Seno Prodjoroemoksa	1960 – 1964
15.	Masjchun Sofwan, S.H.	1964 - 1978
16.	Drs. H. Jacub	1978-1983
17.	Drs. H. Sri Soebagjo	27-07-1983-27-07-1993
18.	Drs. H. Sardjono, S.H., CN.	28-07-1993 – 2003
19.	Drs. Totok Ary Prabowo, M.Si., M.A.	2003 – sekarang
No. Ketua DPRD 1950 – 2004		
1.	Moh. Iskak (DPRDS Tk. II Temanggung)	1950 - 1955
2.	M. Wimboharjono (DPR-GR)	17-07-1961 – 07-11-1965
3.	R.W.S. Tjokrowardojo (DPR-GR)	30-06-1970 – 07-10-1971
4.	Marsaid (DPRD Tk.II Temanggung)	07-10-1971 –30-06-1982
5.	Soeratni (DPRD Tk. II Temanggung)	30-07-1982 – 11-07-1987
6.	Darjanto (DPRD Tk.II Temanggung)	18-07-1987 – 22-05-1996
7.	Letkol. TNI (purn.) Sugiarto	23-05-1996 – 1999
8.	Drs. M. Bambang Soekarno	1999 – 2004

Sumber: *Temanggung. Tempo Dulu, Sekarang serta Prospek di Masa Mendatang, 1997.*



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
SUMBER MATA AIR PUKATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PETA

PETA WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETERANGAN:



GAMBAR 1.2

HALAMAN 1 - 19

SKALA

KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
2003

